

**PENGARUH PENERIMAAN PAJAK HIBURAN DAN INFLASI
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
(Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota
Medan)**

Oleh:

SAPARUDDIN

NIM 27.13.3.080



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

ABSTRAK

Saparuddin, (2017). **Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan)**. Dibawah bimbingan Bapak **Drs. Sugianto, MA** sebagai pembimbing Skripsi I dan **Ibu Kusmilawaty, M. AK** sebagai pembimbing Skripsi II.

Pajak hiburan merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial bagi pendapatan asli daerah kota Medan. Penerimaan di sektor pajak juga dipengaruhi oleh Inflasi daerah, dimana kondisi umum kenaikan harga barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah sehingga upaya percepatan pembangunan juga terhambat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerimaan pajak hiburan dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan menggunakan data sekunder. Berupa data laporan realisasi pendapatan asli daerah kota Medan tahun 2013– 2015. Variabel dalam penelitian ini adalah pajak hiburan dan inflasi sebagai variabel bebas, serta pendapatan asli daerah sebagai variabel terikat. Analisis data menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan pajak hiburan dan inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan asli daerah kota Medan. Hal ini dibuktikan dengan hasil yang diperoleh berdasarkan pengujian hipotesis, dimana pajak hiburan dengan tingkat signifikan pada $\alpha = 1\%$ dengan $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$ ($20.50026 > 2.750$), dan Inflasi dengan nilai signifikan sebesar $\alpha = 1\%$ dengan $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$ ($-1.142896 < -2.750$). Sehingga variabel pajak hiburan yang mengalami kenaikan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan variabel inflasi yang mengalami kenaikan akan menurunkan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci : pajak hiburan, inflasi, PAD

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya selama proses pengerjaan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan)”** dengan baik. Tujuan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan doa dari semua pihak baik secara moril maupun materil terutama untuk keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat kedua orangtuaku tersayang H. Aminullah dan Siti Aminah, terima kasih kalian telah menjadi orang tua yang selalu sabar dalam mendidik dan membimbing saya hingga saat ini dan terima kasih pula atas nasehat, bantuan dan motivasinya selama kuliah hingga penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Andri Soemitra, MA selaku Dekan dan Bapak Dr. H. Muhammad Yafiz, M.Ag, Ibu Dr. Hj. Chuzaimah Batubara, MA dan Ibu Nurlaila Harahap, MA selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Ibu Marliyah, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Hendra Hermain SE, M.Pd selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Ibu Kamila, SE, Ak. M.Si selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Bapak Sugianto, MA, Drs selaku dosen pembimbing I dan Ibu Kusmilawaty, SE, M. AK selaku dosen pembimbing II terima kasih banyak atas arahan,

bimbingan, saran dan waktu yang telah diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

6. Hendra Hermain SE, M.Pd selaku penasihat akademik penulis yang juga telah berperan penting dalam memberikan bantuan baik berupa arahan maupun motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSU.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan, dan nasihatnya kepada penulis selama menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
8. Teman-teman MW, Rizki, Sapar, Ayu, Dinda As, Afrida, Reni, Ria, Dinda Au, Mbak Tari dan Bang Edi tentor kami.
9. Ashabul kahfi Rajab, Bang Udin, Iqbal, Leni, Intan, Wirda, Widya dan Pengurus, Kader, Anggota Universal Islamic Economics.
10. Teman-teman AKS-B 2013 yang selama empat tahun bersama.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun sehingga dapat dijadikan acuan dalam penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya. Terima Kasih. Wassalam.

Medan, 30 Oktober 2017
Penulis

Saparuddin

NIM. 27133080

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
ABSTRAKSI	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang masalah.....	6
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan masalah.....	7
D. Rumusan masalah.....	7
E. Tujuan dan manfaat penelitian	7
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Pendapatan Asli Daerah	9
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah	9
b. Faktor- faktor yang mempengaruhi PAD	9
c. Sumber pendapatan Asli Daerah	14
2. Pajak Daerah	15
a. Pengertian Pajak Daerah.....	15
b. Dasar Hukum Perpajakan Daerah	17
c. Tarif Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota	20
d. Kriteria Pemungutan Pajak Daerah	21
3. Pajak Hiburan	22
a. Pengertian pajak Hiburan	19
b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan	24
c. Objek pajak Hiburan.....	24
d. Subjek Pajak Dan Wajib Pajak Hiburan.....	25
e. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak hiburan....	26
f. Sistem pemungutan pajak.....	24

g. Hambatan pemungutan pajak	25
4. Inflasi.....	29
a. Pengertian inflasi	29
b. Macam inflasi	29
c. Metode perhitungan inflasi.....	31
d. Penyebab dan dampak inflasi	33
e. Pengendalian inflasi daerah di indonesia	34
f. Inflasi dalam perspektif Islam	36
B. Penelitian Terdahulu	38
C. Kerangka Teoritis.....	42
D. Hipotesa.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Pendekatan penelitian.....	44
B. Lokasi dan waktu penelitian.....	44
1. Lokasi penelitian	44
2. Waktu penelitian	45
C. Populasi dan sampel.....	45
1. Populasi	45
2. Sampel.....	45
D. Data penelitian	45
1. Jenis Data	45
2. Sumber Data.....	45
E. Teknik pengumpulan data.....	46
F. Defenisi operasional.....	46
1. Variabel terikat (Y)	46
2. Variabel bebas (X1,X2).....	47
G. Tekhink analisis data.....	47
1. Uji statistik deskriptif.....	47
2. Uji penyimpangan asumsi klasik	47
a. Uji Normalitas Data.....	47
b. Autokorelasi	48
c. Heteroskedastisitas	50
3. Uji kesesuaian	50
4. Uji Model	53
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Temuan Penelitian.....	54
1. Gambaran Umum Badan pengrlolaan pajak dan retribusi Daaerah Kota Medan	54
2. Pendapatan Asli Daerah.....	57
3. Hasil Uji Statistik	63

B. Pembahasan.....	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN- LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

1.1 Target dan realisasi pendapatan asli daerah Kota Medan Tahun 2013-2015	3
1.2 Target dan realisasi pajak hiburan Kota Medan Tahun 2013-2015	3
1.3 Perkembangan inflasi Kota Medan Tahun 2013-2015.....	6
2.1 Kegiatan pengendalian inflasi daerah di Indonesia oleh Bank Indonesia..	34
2.2 Penelitian terdahulu.....	39
4.5 Hasil uji DW statistik (Autokorelasi).....	66
4.6 Hasil uji Heteroskedastisitas	67
4.7 Hasil uji model (Regresi Linier Berganda)	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Model kerangka berpikir	43
4.1 Hasil uji normalitas	64
4.2 Kurva uji DW statistik	66
4.3 Kurva uji T pajak hiburan	69
4.4 Kurva uji T inflasi	70
4.5 Kurva uji F statistik.....	71

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

- 1 Uraian tugas dan struktur organisasi Badan pengelolaan pajak dan retribusi Kota Medan.
- 2 Laporan pendapatan asli daerah, pajak hiburan dan inflasi tahun 2013-2015
- 3 Hasil uji *reviews* 9

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Upaya pemerintah ini diwujudkan dengan kebijakan desentralisasi pengelolaan daerah dijalankan oleh pemerintah daerah yang disebut otonomi daerah. Otonomi daerah di Indonesia mulai diberlakukan pada tanggal 01 Januari 2001, dimana otonomi daerah memacu pemerintah daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah serta dengan diberlakukannya otonomi daerah tersebut, pemerintah menetapkan Undang - Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah, sumber-sumber pendapatan Asli daerah terdiri atas:

1. Pendapatan pajak Daerah
2. Pendapatan Retribusi Daerah
3. Pendapatan Bagian Laba BUMN dan Investasi lainnya
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti atas UU nomor 25 Tahun 1999 “ perimbangan keuangan antara pemerintah dan daerah ” menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana di bawah ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c. Lain- lain pendapatan daerah yang sah.

Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang- undang tentang pemerintah daerah menetapkan pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai kondisi masing- masing daerah dan setiap daerah diberi wewenang yang lebih luas untuk menggali, mengelola dan menggunakan sumber- sumber daya alam serta potensi- potensi lain yang terdapat di daerahnya masing- masing, sehingga nantinya dapat meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD), serta guna menunjang kelancaran pelaksanaan pembangunan dan pemerintahannya. Tujuan akhirnya adalah setiap daerah dituntut untuk bisa mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat, sehingga setiap daerah harus bisa dan mampu membiayai rumah tangganya sendiri.¹

Pendapatan daerah dapat berasal dari pendapatan asli daerah sendiri, pendapatan asli daerah yang berasal dari pembagian pendapatan asli daerah, dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pinjaman daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang sah.² Kota Medan sebagai kota metropolitan dengan intensitas aktivitas ekonomi yang tinggi, pada umumnya akan mendapatkan penerimaan dana daerah berupa pembayaran pajak dari objek pajak, karena semakin tinggi aktivitas perekonomian suatu daerah menggambarkan penerimaan pajak daerah semakin baik, yang pada artinya pelaksanaan kebijakan daerah dapat dilakukan dengan maksimal.

¹Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010) hlm.11

²Suparmoko, *Ekonomi Publik: untuk keuangan dan pembangunan Daerah*, edisi pertama, (yogyakarta: 2001) hlm 55

Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2013 – 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp 1.578.247.819.724,32	Rp 1.206.169.709.147,73
2014	Rp 1.678.116.623.125,00	Rp 1.384.246.114.729,62
2015	Rp 1.794.704.774.012,45	Rp 1.413.442.053.247,36

Sumber : Badan pengelolaan pajak dan Retribusi Kota Medan, 2017

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan asli daerah belum pernah mencapai target yang ditetapkan, jumlah penerimaan secara umum masih kurang sekitar 300 juta lebih dari target pertahunnya. Jumlah penerimaan yang paling besar terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar Rp1.413.442.053.247,36 namun masih belum mencapai target tahun itu sebesar Rp1.794.704.774.012,45, dimana target yang ditetapkan pemerintah secara rata – rata naik sebesar 100 juta pertahun dengan realisasi penerimaan juga naik secara rata – rata sebesar 100 juta pertahun, namun masih belum mencapai angka yang ditargetkan.

Salah satu jenis pajak yang menjadi pos penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan adalah pajak hiburan, untuk melihat perkembangan penerimaan daerah dari pajak hiburan yang diterima dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pajak Hiburan Kota Medan Tahun 2013- 2015

Tahun	Target	Realisasi
2013	Rp 35.308.417.000,00	Rp 26.404.053.135,43
2014	Rp 35.308.417.000,00	Rp 29.504.654.723,04
2015	Rp 984.597.900,00	Rp 262.565.328,39

Sumber: Badan pengelolaan pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan 2017.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa penerimaan pajak hiburan Kota Medan tahun 2013, 2014 dan 2015 belum pernah mencapai target yang ditetapkan. Target yang ada pada tahun 2013 dan 2014 adalah sama yaitu Rp35.308.417.000,00 dan terlihat pajak hiburan yang terkumpul tahun 2014 lebih baik dari tahun 2013 lebih dari 3 miliar, namun capaian ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2015, dimana ketika target diturunkan menjadi Rp948.597.900,00 penerimaan pajak hiburan hanya mampu diserap sebesar Rp262.565.328,39 yang menandakan bahwa meskipun penurunan target dilakukan, realisasi penerimaan pajak hiburan masih belum mencapai targetnya.

Dengan otonomi daerah akan lebih banyak eksperimen dan inovasi dalam bidang administrasi dan ekonomi yang dapat dilakukan. Karena banyak pemerintah daerah yang sifatnya otonom, akan banyak pula cara dan sistem administrasi maupun ekonomi yang berbeda- beda yang diterapkan pada daerah yang berbeda.

Untuk dapat melaksanakan otonomi daerah, setiap daerah harus memiliki faktor- faktor penunjang diantaranya manusia sebagai pelaksana, maka pelaksanaan kegiatan harus lebih baik, pengelolaan keuangan yang transparan dan sistem peraturan yang dipatuhi lembaga daerah, peralatannya pun harus cukup dan baik serta organisasi manajemennya harus baik. Dengan melihat hal tersebut, salah satu faktor yang memegang peranan sangat penting adalah faktor keuangan. Seperti yang kita ketahui bahwa keberhasilan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila didukung dengan keuangan (dana) yang baik pula. Keuangan merupakan salah satu syarat kelancaran pelaksanaan pembangunan. Kemampuan keuangan daerah menunjukkan sejauh mana daerah dapat membiayai pembangunan dan pemerintahannya yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri.

Suatu kenyataan bahwa sumber pendapatan tidak semuanya diberikan pada daerah. Oleh karena itu maka setiap daerah berkewajiban untuk menggali sumber pendapatannya sendiri berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Salah satu yang termasuk pendapatan daerah adalah pajak daerah, beberapa diantaranya adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak

reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak air bawah tanah.

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak hiburan adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang diandalkan pemerintah kota untuk pembiayaan pembangunan. Kota Medan yang merupakan salah satu kota terbesar ketiga di Indonesia dimana terdapat banyaknya tempat hiburan seperti mall, tempat karaoke, bioskop, klub, gedung seni dan sebagainya. Dengan adanya fenomena ini seharusnya bisa menjadikan pajak hiburan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang potensial bagi pendapatan asli daerah kota Medan.

Penerimaan di sektor pajak juga dipengaruhi oleh Inflasi daerah³, dimana kondisi umum kenaikan harga barang dan jasa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah sehingga upaya percepatan pembangunan juga terhambat. Perkembangan inflasi kini sangat dominan dampaknya terhadap pertumbuhan penerimaan dan pengeluaran negara, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia diukur dengan konsumsi masyarakat yang meningkat⁴. Inflasi yang naik berpengaruh terhadap penerimaan pajak melalui penurunan konsumsi yang terjadi di masyarakat, sehingga penerimaan produsen usaha berkurang maka dalam iuran pajak hiburan akan mengalami penurunan juga, pengaruh inflasi memperlihatkan dampak negatif namun tidak signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di Kota Medan.⁵ Perkembangan data inflasi Kota Medan dapat dilihat sebagai berikut.

³Agus Wantara, *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di DIY (1970 – 1992)*, Kinerja – Jurnal Bisnis dan Ekonomi No.2; Yogyakarta, hlm.34 1997

⁴Fuad Rahmany, *Realisasi Pendapatan Pajak 2013 Capai Rp1.000 Triliun*, Jakarta; Artikel Bisnis dan Keuangan Kompas, 2014

⁵Henry Rotuahman Manik, *Analisis Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Sumber Penghasilan Perusahaan dan Sumber Pendapatan Masyarakat Terhadap Penerimaan*

Tabel 1.3 Perkembangan Inflasi Kota Medan 2013 – 2015

Bulan	Tahun		
	2013	2014	2015
Januari	1.21	1	-0.35
Februari	0.80	-0.59	-1.36
Maret	0.42	-0.34	-0.01
April	0.74	0.34	0.96
Mei	0.34	0.30	1.01
Juni	1.28	0.60	0.77
Juli	2.74	0.80	0.82
Agustus	0.50	0.67	0.59
September	0.12	0.23	2.44
Oktober	1	0.71	-0.33
November	0.61	1.75	0.53
Desember	0.50	2.53	1.37

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Kota Medan Tahun 2017

Dari data tabel 1.3 dapat dilihat perkembangan inflasi Kota Medan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 mengalami fluktuasi, dimana angka tertinggi pada periode tersebut terjadi di bulan Juli tahun 2013 sebesar 2.74 sedangkan angka terendah terjadi di bulan Maret tahun 2015 sebesar -0.01, secara umum terlihat angka inflasi mengalami peningkatan pada Quartal IV yaitu di bulan Oktober, November dan Desember, meskipun inflasi diatas angka 2 persen hanya terjadi di bulan Desember tahun 2014, lebih kecil dibandingkan 2 kali angka inflasi diatas 2 persen terjadi pada periode tahun data pada Quartal III yaitu di bulan Juli, Agustus

dan September, dimana inflasi diatas 2 persen terjadi pada bulan Juli tahun 2013 dan bulan Desember tahun 2015.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian tentang pengaruh penerimaan pajak hiburan dan Inflasi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan menarik untuk dilakukan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut maka penulis menemukan identifikasi masalah untuk dikembangkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan otonomi daerah belum mampu menjadikan daerah memenuhi kebutuhan keuangannya.
2. Terdapat perkembangan inflasi bulanan yang fluktuatif selama tahun 2013,2014 dan 2015, dimana angka tertinggi yaitu 2,74 % terjadi pada bulan Juli 2013 sedangkan angka terendah 0,01% terjadi di bulan Maret 2015. Perkembangan ini juga diikuti dengan beberapa angka inflasi diatas 2 % yaitu terjadi pada Desember 2014 dan September 2015.
3. Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan tidak pernah memenuhi target sejak tahun 2013 sampai tahun 2015.
4. Penerimaan Pajak Hiburan pemerintah daerah Kota Medan tidak pernah memenuhi target sejak tahun 2013 sampai tahun 2015.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat di batasi sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu Pajak hiburan dan Inflasi.
2. Pajak Daerah yang menjadi objek penelitian ini adalah Pajak Hiburan Kota Medan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.
3. Inflasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah inflasi Kota Medan pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah, maka permasalahan penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerimaan pajak hiburan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota medan?
2. Apakah Inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah kota medan?
3. Apakah penerimaan pajak hiburan dan Inflasi berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah medan?

E. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Inflasi mempengaruhi pendapatan asli daerah.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerimaan pajak hiburan dan Inflasi terhadap pendapatan asli daerah.

Adapun manfaat penelitian yaitu:

1. Bagi penulis, Penelitian ini merupakan suatu kesempatan bagi peneliti untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh dari bangku kuliah, serta memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan khususnya tentang Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan, dalam rangka meningkatkan pemasukan pajak hiburan dan Inflasi, secara efektif untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

- b. Menyediakan informasi mengenai Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan dan diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan dimasa yang akan datang.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Landasaan Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan. Yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.⁶

b. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

1) Penerapan Otonomi Daerah

Kewenangan otonomi daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, seperti perencanaan, perizinan, dan pelaksanaan, kecuali kewenangan di bidang-bidang pertahanan keamanan, peradilan, politik luar negeri, moneter/fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang di atur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan otonomi di tingkat provinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas kabupaten dan kota dan kewenangan-kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan daerah otonom kabupaten dan kota, serta kewenangan bidang pemerintahan lainnya.⁷ Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan

⁶Ahmad Yani, *hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm 51.

⁷silviana, safitri, *perencanaan sistem instalasi pengolahan air limbah*, (Jakarta: UI Press, 2009) hlm 58.

kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, oleh karena itu, PAD harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah.⁸

2) Dana Perimbangan Keuangan

Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang di bagihasilkan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-undang ini merupakan penyelarasan dengan Undang-undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang-undang ini di muat pengaturan mengenai Bagi Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sector pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi, Selain itu, dana reboisasi yang semula termasuk bagian dan DAK, dialihkan menjadi DBH.

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah, DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity). Dalam Undang-Undang ini di tegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, Daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar akan memperoleh alokasi

⁸Landiyanto, agustino, *kinerja keuangan dan strategi pembangunan kota di era otonomi daerah : studi kasus kota surabaya*, CURES working paper surabaya, 2005, hlm 68.

DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK dimaksudkan untuk membantu membiayai kegiatan-kegiatan khusus di daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan Daerah.⁹

3) Produk Domestik Bruto (PDB)

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu indikator makro ekonomi yang pada umumnya digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi di suatu negara. Sedangkan untuk tingkat wilayah, Propinsi maupun Kabupaten/Kota, digunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Secara teori dapat dijelaskan bahwa PDRB merupakan bagian dari PDB, sehingga dengan demikian perubahan yang terjadi di tingkat regional akan berpengaruh terhadap PDB atau sebaliknya. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).¹⁰

4) Belanja Daerah

Belanja menurut kelompok belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) Permendagri No. 13 Tahun 2006 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program, yang meliputi:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

⁹ Silviana, safitri, *perencanaan sistem instalasi pengolahan air limbah*, (Jakarta: UI Press, 2009) hlm 87- 90.

¹⁰ Hariyanto dkk, *hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita*, (makassar: simposium nasional, 2007), Hlm 68- 70.

b) Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

c) Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

d) Belanja Hibah

Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorang yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

e) Bantuan Sosial

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

f) Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

h) Belanja tidak terduga

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf h merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Langsung, meliputi:

a) Belanja Pegawai

Belanja pegawai untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah,

b) Belanja Modal

Belanja modal untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

c) Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.¹¹

c. Sumber Pendapatan Asli Daerah

1) Pajak Daerah

Berdasarkan undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

¹¹Hariyanto dkk, *hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita*, (makassar: simposium nasional, 2007). Hlm 72.

berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Sementara itu menurut pendapat yang lain, disebutkan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah, sebagai salah satu pendapatan asli daerah menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi pajak daerah semakin tinggi pula Pendapatan Asli Daerah. Dengan demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.¹²

2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.¹³

3) Hasil pengelolaan keuangan milik daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga.

4) Lain- lain PAD yang sah.

¹²Hariyanto dkk, hlm, 77- 90

¹³Toar Waraney Lakoy, “Kontribusi dan pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan Asli daerah di Kabupaten Minahasa selatan (2005- 2014)”, *dalam jurnal berkala ilmiah efisiensi*, volume 16 No. 01 Tahun 2016, hlm 561.

2. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pengertian yang terkait dengan pajak daerah antara lain:

1) Daerah otonom

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan NKRI.¹⁴

2) Pajak Daerah

Yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

3) Badan

Adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseorangan terbatas, perseorangan komanditer, prseorangan lainnya, BUMN atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masal, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.

¹⁴Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.

4) Subjek pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak Daerah.

5) Wajib pajak

Adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Pajak daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak daerah tingkat I dan pajak daerah tingkat II:

a) Pajak daerah tingkat I (Provinsi)

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat I antara lain:

- 1) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air
- 2) Bea balik nama kendaraan bermotor
- 3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
- 4) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

b) Pajak daerah tingkat II (Kabupaten/kota)

Sedangkan menurut UU No.28 tahun 2009 disebutkan bahwa pajak daerah yang dapat dipungut oleh daerah tingkat II, antara lain:

- 1) Pajak hotel
- 2) Pajak restoran
- 3) Pajak hiburan
- 4) Pajak reklame
- 5) Pajak penerangan jalan
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C
- 7) Pajak parkir
- 8) Pajak sarang burung walet
- 9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

b. Dasar hukum perpajakan daerah

Penetapan pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan daerah dari awal kemerdekaan Indonesia sampai saat ini dapat dilihat pada berbagai undang-undang di bawah ini:

- 1) UU No. 48 Tahun 1948 tentang pemerintah daerah menetapkan pendapatan daerah adalah:
 - a) Pajak daerah, termasuk juga retribusi
 - b) Hasil perusahaan daerah
 - c) Pajak negara yang diserahkan kepada daerah dan
 - d) Pendapatan lain- lain, meliputi pinjaman, subsidi (sokongan), macam- macam penjualan barang- barang milik daerah, penyewaan barang milik daerah dan lain- lain.
- 2) UU No. 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara negara dengan daerah- daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri menetapkan yang menjadi pendapatan pokok dari daerah ada lima kelompok yaitu:
 - a) Pajak daerah
 - b) Retribusi daerah
 - c) Pendapatan yang diserahkan kepada daerah
 - d) Hasil perusahaan daerah
 - e) Dalam hal- hal tertentu kepada daerah dapat diberikan ganjaran, subsidi, dan sumbangan.
- 3) UU No. 18 tahun 1965 tentang pokok- pokok pemerintahan daerah menetapkan sumber keuangan daerah adalah:
 - a) Hasil perusahaan daerah dan sebagian hasil perusahaan negara
 - b) Pajak daerah
 - c) Retribusi daerah
 - d) Pajak negara yang diserahkan kepada daerah
 - e) Bagian dari hasil pajak pemerintah pusat
 - f) Pinjaman
 - g) Lain- lain hasil usaha yang sesuai dengan kepribadian nasional.

- 4) UU No.5 Tahun 1974 tentang pokok- pokok pemerintahan di daerah menetapkan bahwa sumber keuangan daerah adalah sebagai berikut:
 - a) Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi Daerah
 - 3) Hasil Perusahaan Daerah
 - 4) Lain- lain hasil usaha daerah yang sah
 - b) Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah, yang terdiri dari:
 - 1) Sumbangan dari Pemerintah
 - 2) Sumbangan- sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang- undangan
 - 3) Lain- lain pendapatan yang sah
- 5) UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menetapkan bahwa untuk melaksanakan otonomi daerah, khususnya asas desentralisasi. Pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan dari empat kelompok sebagaimana di bawah ini:
 - a) Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu penerimaan yang diperoleh dari sumber- sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, meliputi:
 - 1) Hasil pajak daerah
 - 2) Hasil retribusi daerah
 - 3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, antara lain bagian laba, dividen dan penjualan saham milik daerah, serta
 - 4) Lain- lain pendapatan daerah yang sah, antara lain hasil penjualan aset tetap daerah dan jasa giro.
 - b) Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari penerimaan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk

membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

- c) Pinjaman daerah, yaitu semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau manfaat bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.
 - d) Lain- lain penerimaan yang sah, antara lain hibah atau penerimaan dari daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota lainnya, dana darurat, dan penerimaan lainnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
- 6) UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No.33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menetapkan bahwa penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah bersumber dari tiga kelompok sebagaimana dibawah ini:
- a) Pendapatan asli daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dan di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang- undangan, meliputi:
 - 1) Pajak daerah
 - 2) Retribusi daerah, termasuk hasil dari pelayanan Badan Layanan Umum (BLU) daerah
 - 3) Hasil pengolahan kekayaan yang dipisahkan, antara lain bagian laba dari BUMD, hasil kerjasama dengan pihak ketiga, dan
 - 4) Lain- lain PAD yang sah.
 - b) Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Lain- lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber penerimaan daerah yang kedua, yaitu pembiayaan yang bersumber dari:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
- 2) Penerimaan pinjaman daerah
- 3) Dana cadangan daerah
- 4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

c. Tarif- Tarif Pajak Daerah Untuk Kabupaten/Kota

Besarnya tarif yang berlaku untuk pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah, namun tidak boleh lebih tinggi dari tarif maksimum yang telah ditentukan dalam undang- undang. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2009 ditentukan besarnya tarif pajak diantaranya:

- 1) Pajak hotel dengan tarif 10%
- 2) Pajak restoran dengan tarif 10%
- 3) Pajak hiburan dengan tarif 35%
- 4) Pajak reklame dengan tarif 25%
- 5) Pajak penerangan jalan dengan tarif 10%
- 6) Pajak pengambilan bahan galian golongan C dengan tarif 20%
- 7) Pajak parkir dengan tarif 20%
- 8) Pajak sarang burung walet dengan tarif 10%
- 9) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 5%.¹⁵

d. Kriteria Pemungutan Pajak Daerah

Kebijakan pemungutan pajak daerah berdasarkan peraturan daerah, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat, karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian dan akan merugikan rakyat, dalam hal ini adalah wajib pajak, karena harus melakukan pembayaran berulang. Oleh sebab itu, pemerintah melakukan pembenahan mengenai regulasi terkait. Hal tersebut sebetulnya sudah

¹⁵Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.

diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diubah dalam UU No.34 Tahun 2000 dan diubah lagi menjadi UU No.28 tahun 2009, dimana dinyatakan dalam pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat. Maka agar tidak memungut pajak dibutuhkan kriteria pemungutan pajak. Adapun kriteria pemungutan untuk pajak daerah kabupaten/kota menurut UU No.28 tahun 2009 perpajakan yaitu sebagai berikut.

- 1) Bersifat pajak bukan retribusi.
- 2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- 3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
- 4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak pusat.
- 5) Potensinya memadai.
- 6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
- 7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
- 8) Menjaga kelestarian lingkungan.¹⁶

3. Pajak Hiburan

a. Defenisi Pajak Hiburan

Sesuai dengan undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1 angka 24 dan 25, pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pengenaan pajak hiburan tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak

¹⁶Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.

mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Mengingat kondisi kabupaten dan kota di Indonesia tidak sama, termasuk dalam hal jenis hiburan yang diselenggarakan, maka untuk dapat diterapkan pada suatu daerah kabupaten atau kota pemerintah daerah setempat harus mengeluarkan peraturan daerah tentang pajak hiburan yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak hiburan di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.¹⁷

Keberadaan pajak hiburan sebagai salah satu jenis pajak kabupaten atau kota diatur juga dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mulai tanggal 1 Januari 2010 menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia.

Dalam pemungutan pajak hiburan terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

- 1) Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
- 2) Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau badan yang bertindak baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya dalam menyelenggarakan suatu hiburan.
- 3) Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas yang disediakan oleh penyelenggara hiburan, kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain), dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
- 4) Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima dalam bentuk apa pun untuk harga pengganti yang diminta atau seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukar atas pemakaian dan atau pembelian jasa hiburan serta fasilitas penunjangnya termasuk pula semua tambahan dengan nama apa pun juga yang

¹⁷Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.

dilakukan oleh wajib pajak yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan hiburan. Termasuk dalam pengertian pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima, termasuk yang akan diterima, antara lain pembayaran yang dilakukan tidak secara tunai.

- 5) Tanda masuk adalah semua tanda atau alat atau cara yang sah dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan fasilitas, atau menikmati hiburan. Tanda atau alat atau cara yang sah adalah berupa tanda masuk yang dilegalisasi oleh dinas pendapatan daerah kabupaten/kota. Termasuk tanda masuk di sini adalah tanda masuk dalam bentuk dan dengan nama apapun, misalnya karcis, tiket undangan, kartu langganan, kartu anggota (*membership*), dan sejenisnya.
- 6) Harga tanda masuk, yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai uang yang tercantum pada tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung.

b. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hiburan

Pemungutan pajak hiburan di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hiburan pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagaimana di bawah ini.

- 1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
- 3) Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.
- 4) Peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur tentang pajak hiburan.

- 5) Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang pajak hiburan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak hiburan paa kabupaten/kota dimaksud.

c. Objek Pajak Hiburan

1) Objek pajak hiburan

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang atas jasa penyelenggaraannya ditentukan menjadi objek adalah:

- a) Tontonan film.
- b) Pagelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana.
- c) Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
- d) Pameran.
- e) Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya.
- f) Sirkus, akrobat, dan sulap.
- g) Permainan bilyar, golf dan bowling.
- h) Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- i) Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan.
- j) Pertandingan olahraga.¹⁸

Penyelenggaraan hiburan yang dikenakan pajak adalah penyelenggaraan hiburan oleh penyelenggara hiburan yang memungut bayaran. Umumnya setiap penyelenggara hiburan harus mendapat izin tertulis dari bupati/walikota, kecuali untuk wilayah DKI Jakarta diberikan oleh gubernur. Pengajuan izin harus diajukan secara tertulis sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh kepala daerah. Izin penyelenggara hiburan diberikan untuk jangka waktu tertentu dan dapat diperpanjang. Izin tersebut tidak dapat dipindahtangankan, kecuali atas seizin kepala daerah. Hal ini terkait juga dengan kewajiban perpajakan, yaitu penyelenggara hiburan tersebut merupakan wajib pajak yang harus memenuhi kewajiban perpajakan di bidang pajak hiburan.

¹⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.

2) Bukan objek pajak hiburan

Pada pajak hiburan tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat dan kegiatan keagamaan.

d. Subjek pajak dan wajib pajak hiburan

Pada pajak hiburan yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pada pajak hiburan subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang menikmati hiburan. Sementara itu, yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Dengan demikian, pada pajak hiburan subjek pajak dan wajib pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati hiburan merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara penyelenggara hiburan bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Dalam menjalankan kewajiban perpajakannya wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hiburan. Wakil wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi dan atau secara tanggung renteng atas pembayaran pajak terutang. Selain itu, wajib pajak dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

e. Dasar pengenaan, tarif, dan cara perhitungan pajak hiburan

1) Dasar pengenaan pajak hiburan

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan tiket Cuma- Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan.

2) Tarif pajak hiburan

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar tiga puluh lima persen dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing- masing daerah kabupaten/kota. Dengan demikian, setiap daerah kabupaten/kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten/kota lainnya, asalkan tidak lebih dari tiga puluh lima persen. Untuk mendukung pengembangan kesenian tradisional, hiburan berupa kesenian tradisional umumnya dikenakan tarif pajak yang lebih rendah dari hiburan lainnya.

Dalam undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 45 ayat 2 dan 3 ditentukan bahwa khusus untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Selain itu, khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Hiburan berupa kesenian rakyat/tradisional adalah hiburan kesenian rakyat/tradisional yang dipandang perlu untuk dilestarikan dan diselenggarakan di tempat yang dapat dikunjungi oleh semua lapisan masyarakat.

Oleh karena objek pajak hiburan meliputi berbagai jenis hiburan, pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk masing- masing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. Misalnya, suatu pemerintah daerah kota menetapkan besarnya tarif pajak hiburan untuk setiap jenis hiburan sebagaimana berikut ini.

- a) Tarif pajak untuk pertunjukan film bioskop ditetapkan:
- 1) Golongan A. II utama sebesar 15%
 - 2) Golongan A, II sebesar 12,5%
 - 3) Golongan A. I sebesar 12,5%
 - 4) Golongsn B. II sebesar 10%
 - 5) Golongan B. I sebesar 10%
 - 6) Golongan C sebesar 7,5%
 - 7) Golongan D sebesar 7,5% dan
 - 8) Jenis keliling sebesar 5%
- b) Tarif pajak untuk pertunjukan kesenian antara lain kesenian tradisional, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10%.
- c) Tarif pajak untuk pertunjukan/pagelaran musik dan tari ditetapkan sebesar 25%.
- d) Tarif pajak untuk diskotik dan bar ditetapkan sebesar 30%.
- e) Tarif pajak untuk karaoke, musik hidup, ruang musik, balai gita, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 30%.
- f) Tarif pajak untuk klub malam ditetapkan sebesar 30%.
- g) Tarif pajak untuk permainan biliard ditetapkan sebesar 10%.
- h) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10%.
- i) Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%.
- j) Tarif pajak untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25%.
- k) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%.
- l) Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15%.
- m) Tarif pajak untuk wisata, rekreasi termasuk di dalamnya kolam renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukan sirkus, komedi putar, kereta pesiar dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10%.

- n) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental ditetapkan sebesar 15%.
- o) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya menggunakan tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk atau tidak mencantumkan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15%.¹⁹

3) Perhitungan pajak hiburan

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum perhitungan pajak hiburan adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Pajak terutang} &= \text{tarif pajak} \times \text{dasar pengenaan pajak} \\
 &= \text{tarif pajak} \times \text{jumlah uang yang diterima} \\
 &\quad \text{atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.}^{20}
 \end{aligned}$$

4. Inflasi

a. Pengertian inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga- harga untuk naik secara menyeluruh dan terus- menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau mengakibatkan kenaikan pada sebagian besar harga barang- barang lain yaitu, harga makanan, harga minuman, harga tembakau, harga sandang, harga kesehatan, harga pendidikan, rekreasi, harga transportasi, komunikasi dan jasa keuangan.²¹

b. Macam- macam Inflasi

Inflasi dapat dikategorikan berdasarkan beberapa hal, seperti tingkat keparahannya, penyebab, maupun asalnya:

¹⁹Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.

²⁰Peraturan daerah kota medan, *nomor 7 tahun 2011 tentang pajak hiburan*.

²¹ Budiono, *ekonomi Makro*, edisi ke 26, (yogyakarta: BPFE, 2014) hlm 157

- 1) Berdasarkan parah tidaknya inflasi:
 - a) Inflasi ringan (di bawah 10% setahun). Inflasi ini disebut juga dengan inflasi merayap (*creeping inflation*).
 - b) Inflasi sedang (antara 10-30% setahun) atau biasa disebut *galloping inflation* biasanya ditandai dengan naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar.
 - c) Inflasi berat (antara 30-100% setahun) atau *high inflation* biasanya ditandai dengan kenaikan/ perubahan harga yang sangat tinggi.
 - d) Hiperinflasi (di atas 100% setahun) yaitu inflasi yang di tandai dengan naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (di atas 100%). Pada inflasi ini masyarakat tidak lagi menyimpan uang karena nilai uang merosot sangat tajam sehingga lebih baik dibelikan/ ditukarkan dengan barang barang.²²
- 2) Berdasarkan penyebab dari inflasi
 - a) *Demand full inflation*/ inflasi permintaan inflasi ini timbul karena permintaan masyarakat terhadap berbagai barang terlalu kuat sementara di sisi lain, tenaga kerja telah mencapai kesempatan kerja penuh sehingga terjadi kelebihan permintaan. Kondisi ini jika berlangsung terus- menerus akan menciptakan kenaikan harga barang/ inflasi.
 - b) *Cost push inflation*/ inflasi penawaran. Inflasi ini timbul karena kenaikan biaya produksi atau berkurangnya penawaran agregatif. Kenaikan biaya produksi tersebut bisa jadi dikarenakan mahalnya harga bahan baku, tuntutan kenaikan upah maupun karena terdepresiasi nilai tukar dalam negeri.
- 3) Berdasarkan asal dari inflasi
 - a) Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*domestic inflation*). Inflasi ini biasanya disebabkan adanya defisit dalam

²²M. Ridawan dkk, *ekonomi pengantar mikro makro Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2013), hlm 178.

pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada APBN, bencana alam, gagal panen dan lain sebagainya.

- b) Inflasi yang berasal dari luar negeri (*mported inflation*). Inflasi ini disebabkan negara- negara yang menjadi mitra dagang mengalami inflasi, sehingga menyebar ke negara- negara yang menjadi mitranya.²³

c. Metode Perhitungan Inflasi

Perhitungan inflasi di Indonesia diukur dengan pendekatan Indeks Harga Konsumen (*Price Consumers Index* / IHK) karena merefleksikan harga barang dan jasa di masyarakat. Beberapa perhitungan inflasi dengan pendekatan ini adalah :²⁴

1) Metode Modified Lapeyeres

Metode ini menghitung inflasi dengan pendekatan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan perhitungan harga dan jenis komoditi di masyarakat, metode inilah yang kemudian digunakan Badan Pusat Statistik untuk mengukur inflasi di Indonesia. Adapun rumus perhitungannya :

Modified Laspeyres

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^k \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} (P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i})}{\sum_{i=1}^k P_{0i} \cdot Q_{0i}} \times 100$$

I_n = indeks bulan ke-n

P_{ni} = harga komoditi i pada bulan ke-n

$P_{(n-1)i}$ = harga jenis komoditi i pada bulan ke-n-1

$P_{(n-1)i} \cdot Q_{0i}$ = nilai konsumsi jenis komoditi i bulan ke n-1

$P_{0i} Q_{0i}$ = nilai konsumsi jenis komoditi i pada tahun dasar

²³M. Ridwan dkk, hlm 178- 179.

²⁴Nursetyo, *Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan; Studi Kasus 44 Kota di Indonesia 2007 – 2012*, Semarang; Universitas Diponegoro, hlm .45, 2013

2) Metode point – to – point

Metode ini menghitung inflasi dengan pendekatan Indeks Harga Konsumen (IHK) berdasarkan perhitungan Indeks Harga Konsumen per bulan dengan menetapkan tahun dasar. Adapun rumus perhitungannya adalah :

metode *point-to-point*

$$IHK \text{ year – on – year} = \left[\frac{I_{nt}}{I_{n(t-1)}} - 1 \right] \times 100$$

I_{tn} = IHK bulan ke-n tahun ke-t

$I_{t(n-1)}$ = IHK bulan ke-n tahun ke-(t-1)

Metode perhitungan inflasi di Indonesia diukur oleh Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Survey Biaya Hidup (SBH) berdasarkan pendekatan Indeks Harga Konsumen (IHK). Tahapan yang dilakukan oleh BPS adalah mengukur perubahan Indeks Harga Konsumen dari waktu ke waktu yang menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, data yang diperoleh kemudian akan diolah BPS untuk menghasilkan data monitor perkembangan harga barang dan jasa secara bulanan di beberapa kota, pasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang dan jasa di setiap kota.²⁵

Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengukur inflasi menggunakan pengelompokan 7 kelompok pengeluaran berdasarkan klasifikasi *the Classification of Individual Consumption by Purpose* (COICOP) yaitu

- a) Kelompok Bahan Makanan
- b) Kelompok Makanan Jadi, Minuman dan Tembakau
- c) Kelompok Perumahan
- d) Kelompok Sandang
- e) Kelompok Kesehatan

²⁵Nursetyo, hlm .46- 48, 2013

f) Kelompok Pendidikan dan Olahraga

g) Kelompok Transportasi dan Komunikasi

Secara teknis perhitungan inflasi pertama tama dilakukan dengan menghitunga masing masing barang dan jasa yang dipergunakan dalam perhitungan angka indeks, kemudian diberi bobot sesuai dengan signifikansi serta intensitas penggunaan barang dan jasa tersebut oleh masyarakat yang bersangkutan, besarnya bobot masing masing barang dan jasa juga disesuaikan dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan.²⁶

d. Penyebab dan Dampak Inflasi

Beberapa pendapat ahli menjelaskan penyebab terjadinya inflasi di negara berkembang seperti Indonesia. Diantara pendapat ahli mengenai penyebab inflasi adalah :

- 1) Inflasi di negara berkembang dapat terjadi disebabkan oleh defisit anggaran belanja pemerintah, dimana defisit anggaran belanja pemerintah ini meningkatkan jumlah uang beredar yang kemudian akan menurunkan nilai mata uang dan membuat harga barang dan jasa naik.²⁷
- 2) Inflasi di negara berkembang dapat disebabkan oleh depresiasi mata uang di negara tersebut, dimana kondisi depresiasi ini akan mengakibatkan perubahan nilai uang di masyarakat dan akan membuat perubahan harga.²⁸
- 3) Inflasi juga dapat terjadi disebabkan adanya kesenjangan perekonomian karena dipacu melebihi kapasitas yang tersedia atau yang lebih dikenal *output gap*.
- 4) Inflasi juga dapat terjadi disebabkan oleh faktor penawaran yaitu dengan adanya perubahan harga barang barang tertentu misalnya

²⁶Suseno dan Siti Astiyah, *Inflasi*, Jakarta; Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, hlm.5, 2009.

²⁷Peter Montiel, *Empirical Analysis of High Inflation Episode in Argentina, Brazil and Israel*, dalam *IMF Working Paper*, Vol.36 No.3, hlm 527 – 549, September 1989.

²⁸Livitian,dkk, *Accelerating Inflation and Balance of Payment Crisis, 1973 – 1984 in The Israeli Economy*, Cambridge; Harvard University Press, hlm.320, 1986

harga bahan bakar minyak dapat mengakibatkan melonjaknya laju inflasi.²⁹

Adapun dampak yang mungkin terjadi karena disebabkan terjadinya inflasi adalah penurunan nilai mata uang dan menjadikan daya beli mata uang menjadi semakin lemah. Penurunan daya beli tersebut selanjutnya akan berdampak terhadap individu, dunia usaha, serta anggaran Pendapatan Nasional/Asli Daerah dan belanja pemerintah secara negatif.

Naik turunnya angka inflasi dalam sistem ekonomi pasar akan menimbulkan potensi distorsi terhadap tingkat harga. Dimana secara umum dampak inflasi ada yang dapat diprediksi (*expected inflation*) seperti ukuran penurunan nilai mata uang, penurunan daya beli masyarakat, penurunan pendapatan dan penerimaan daerah, namun ada juga dampak inflasi yang tak dapat diprediksi (*unexpected inflation*) seperti ketimpangan sosial ekonomi yang berpotensi menimbulkan kesenjangan di tengah masyarakat.³⁰

e. Pengendalian Inflasi Daerah di Indonesia

Upaya pengendalian inflasi daerah di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia dengan beberapa langkah, salah satunya adalah dengan mengadakan berbagai kegiatan dengan Kantor Bank Indonesia (KBI) di berbagai daerah guna mencapai masing masing tujuan kegiatan. Kegiatan Bank Indonesia dalam upaya pengendalian inflasi daerah dapat dilihat sebagai berikut.³¹

²⁹Mankiw, N. Gregory, *teori Makroekonomi*, (Jakarta: edisi keempat, terjemahan, Erlangga, 2000), hlm 112.

³⁰Suseno dan Siti Astiyah, *Inflasi...* hlm.17

³¹Suseno dan Siti Astiyah, *Inflasi...* hlm.51

Tabel 2.1 Kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah di Indonesia oleh Bank Indonesia

Jenis kerjasama	KBI	Kegiatan
MoU dalam pembentukan TPID	Semarang, surabaya, yogyakarta, Bandung, Batam, Pekanbaru, Kendari, Kediri, Denpasar, Medan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertemuan dalam rangka koordinasi antarinstansi di daerah
<i>Focus Group Discussion</i>	Palembang, Manado, Bandar, Lampung, Makassar, Padang, Palangkaraya, Tasikmalaya, Bengkulu, Palu, Jakarta, Ambon.	<ul style="list-style-type: none"> • Identifikasi sumber tekanan inflasi di daerah • Langkah-langkah penanggulangan • Monitoring stok barang • Imbauan

Sumber: Hendar, "Antisipasi Dampak Krisis keuangan global pada perekonomian daerah dan fokus kegiatan kajian ekonomi regional 2009" persentasi pada forum konsolidari KER, 26- 27 november 2008, Bandung.

Dalam hal mengupayakan pencapaian diatas, Bank Indonesia membentuk sinergi antar kantor di berbagai daerah di Indonesia. Tujuan umum pembentukan atau penguatan tim pengendalian inflasi daerah adalah untuk menurunkan inflasi di daerah sehingga inflasi nasional juga turun pada tingkat yang rendah dan stabil. Tujuan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Menurunkan laju inflasi daerah sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan inflasi nasional yang rendah dan stabil.
- 2) Meningkatkan kerja sama dan komitmen kelembagaan di daerah dalam pengendalian inflasi di daerah

- 3) Memantau dan mengendalikan inflasi di daerah dengan rekomendasi langkah- langkah yang dapat diimplementasikan dan dimonitor.

Lembaga tersebut masing masing menjalankan program yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka menjamin stabilitas moneter di dalam negeri. Program kerja tersebut selaras dengan tim pengendalian inflasi nasional. Pengendalian inflasi daerah dari sisi penawaran antara lain dilakukan sebagai berikut.

- 1) Menjaga agar pasokan barang tersedia. Untuk itu, perlu terus ditingkatkan kelancaran distribusi sehingga permintaan masyarakat dapat terpenuhi.
- 2) Mengurangi seminimal mungkin dampak dari *administered price* yang antara lain melalui peningkatan efisiensi dan mencari sumber energi alternatif.
- 3) Mempengaruhi ekspektasi inflasi terhadap pelaku usaha dan masyarakat menuju ekspektasi inflasi yang rendah.

Secara umum tujuan Bank Indonesia adalah untuk menciptakan kondisi perekonomian yang tumbuh dengan tingkat inflasi yang stabil dan terkendali. Dengan inflasi yang rendah dan stabil, pembangunan ekonomi jangka panjang dapat terwujud secara berkelanjutan dan daya beli masyarakat dapat meningkat karena pendapatan riil meningkat. Tujuan akhir dari kebijakan ekonomi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat terwujud.

f. Inflasi Dalam Perspektif Islam

Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk yang memiliki akal dan nafsu sebagai bentuk rahmat Allah SWT, namun terkadang manusia lalai mengendalikan nafsunya dan menjadikan kepemilikan material menjadi orientasi pencapaian keberhasilan hidupnya sehingga aktivitas ekonomi yang menguntungkan bagi dirinya sendiri menjadi pilihan utama baginya. Hal ini sejalan dengan peringatan Allah SWT dalam Quran Surah Ali Imran ayat 14 berikut :

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْخَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

Islam tidak mengenal istilah inflasi, karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Ekonom Islam Taqiuddin Ahmad ibn al-Maqrizi (1364M - 1441M), yang merupakan salah satu murid Ibn Khaldun, menggolongkan inflasi dalam dua golongan yaitu *natural inflation* dan *human error inflation*.³²

1) *Natural Inflation*

Sesuai dengan namanya *natural inflation*, inflasi ini disebabkan oleh sebab alamiah yang diakibatkan oleh turunnya penawaran agregat (AS) atau naiknya permintaan agregat (AD), orang tidak mempunyai kendali atasnya (dalam hal mencegahnya).³³

$$MV = PT = Y$$

Dimana M= Jumlah uang beredar.

V = Kecepatan peredaran uang.

P = Tingkat harga.

T = Jumlah barang dan jasa (Q).

Y = Tingkat pendapatan nasional (GDP).

³²M. Ridwan dkk, hlm186.

³³M. Ridwan dkk., hlm 185- 186

Maka *natural inflation* dapat diartikan sebagai berikut: gangguan terhadap jumlah barang dan jasa (T) yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Misal T turun, sedangkan M dan V tetap, maka konsekuensinya P akan naik. Naiknya daya beli masyarakat secara riil, misalnya nilai ekspor lebih besar dari nilai impor sehingga secara netto terjadi impor uang yang mengakibatkan M naik, sehingga jika V dan T tetap, maka P akan naik. Keseimbangan permintaan dan penawaran juga pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak mau menghentikan atau mempengaruhi pergerakan harga ini sesuai hadist

Anas meriwayatkan, ia berkata: orang- orang berkata kepada Rasulullah SAW, “wahai Rasulullah, harga- harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk kami”. Rasulullah SAW lalu menjawab, “Allah lah penentu harga, penahan, pembentang, dan pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorangpun yang meminta padaku tentang adanya kezhaliman dalam urusan darah dan harta.”

2) *Human error inflation*

Human error inflation adalah inflasi yang terjadi karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia sendiri (QS Ar- Rum ayat 41). *“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)”*. Adapun beberapa penyebabnya di antaranya:

- a) Korupsi dan administrasi yang buruk (*corruption dan a bad administration*)
- b) Pajak yang berlebihan dapat mengakibatkan terjadinya *efficiency loss* atau *dead weight loss*.
- c) Pencetakan uang dengan maksud menarik keuntungan yang berlebihan.

Para Ekonom Islam, Al- Maqrizi berpendapat bahwa pencetakan uang yang berlebihan jelas akan mengakibatkan naiknya tingkat harga umum. (inflasi). Kenaikan harga komoditi tersebut adalah kenaikan dalam bentuk jumlah uang

atau nominal, sedangkan jika diukur dalam emas (dinar emas) maka harga komoditi tersebut jarang sekali mengalami kenaikan.³⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pajak hiburan dan laju inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah banyak dilakukan oleh peneliti- peneliti sebelumnya. Penelitian- penelitian tersebut banyak memberikan masukan serta kontribusi tambahan bagi Dinas Pendapatan Daerah sebagai acuan untuk lebih meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Tabel 2.2

No	Penelitian	Metode	Hasil	Perbedaan dengan skripsi ini
1	Firman Hadi Yiwono (2012) “Analisis potensi dan kontribusi pajak hiburan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah (studi kasus pendapatan daerah kota malang)”. 	Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kuantitatif.	Target kontribusi pajak hiburan terhadap pajak daerah kota malang mengalami kenaikan yang fluktuatif.	Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dan jumlah variabel yang diuji. Dalam penelitian skripsi saya ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dua variabel yaitu pajak hiburan dan inflasi, pengujian dilaksanakan di Kota Medan pada periode tahun data 2011 – 2015.

³⁴M. Ridwan dkk, hlm 186 -187.

2	Yesi Dwi Wulandari, dkk (2015) “ Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel dan Laju Inflasi terhadap penerimaan pajak hotel (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang)	Metode yang digunakan adalah Uji Asumsi Klasik dengan pendekatan <i>time series</i> dengan data sekunder.	Hasil analisis data diketahui bahwa variabel jumlah hotel berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak hotel di Palembang sedangkan variabel jumlah wisatawan dan laju inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel di kota Palembang.	Perbedaan dengan penelitian ini adalah variabel yang diuji, lokasi dan tujuan penelitian. Jurnal ini menggunakan variabel Jumlah Wistawan, Jumlah Hotel dan Laju Inflasi, sedangkan skripsi saya menggunakan variabel pajak hiburan dan laju inflasi, serta variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. Lokasi yang berbeda dengan variabel penelitian yang berbeda pula tentu akan menghasilkan kesimpulan yang berbeda.
3	Nadya Fazrina Haniz dan Hadi Sasana (2013) “ Analisis	Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif	Dari hasil pengujian terlihat bahwa yang berpengaruh signifikan	Perbedaan dengan skripsi saya ini terlihat dari jenis penelitian nya yang menggunakan penelitian kualitatif untuk mencari faktor – faktor suatu

	Faktor – Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah kota Tegal”.	dengan sifat data sekunder, faktor yang ditemukan adalah daerah kena pajak, pendapatan per kapita, pembayar pajak, inflasi dan pertumbuhan ekonomi.	terhadap penerimaan pajak, adalah keseluruhan faktor diatas kecuali satu variabel yaitu inflasi.	fenomena, dan variabel yang digunakan merujuk kepada studi daerah tertentu dengan penelitian kualitatif. Sedangkan skripsi saya menggunakan pendekatan kuantitatif. Capaian penelitian yang ingin skripsi saya adalah menilai apakah variabel pajak hiburan dan inflasi yang ada di Kota Medan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, yang terjadi pada periode tahun 2011 – 2015.
4	Iwan Susanto (2014) “ Analisis Pengaruh PDRB, Pengaruh dan Inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Studi Kasus Kota Malang	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kolaborasi pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Uji Asumsi Klasik kemudian dibahas	Hasil dari pengujian yang dilakukan adalah bahwa variabel PDRB dan penduduk secara simultan berpengaruh terhadap PAD Kota Malang	Perbedaan dengan skripsi saya terletak pada variabel yang digunakan, lokasi penelitian, periode tahun data. Secara umum skripsi saya tidak membahas PDRB dan jumlah penduduk seperti yang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Analisis lanjutan setelah uji pengaruh tidak digunakan dalam penelitian saya, dan periode tahun data lebih banyak digunakan oleh

	Tahun 1998 – 2012.	dengan analisis untuk mendapatkan pembahasan yang dalam dan tajam.	pada periode tersebut sedangkan inflasi berpengaruh secara tidak signifikan.	peneliti sebelumnya. Penelitian saya hanya bertujuan untuk mengukur tingkat pengaruh dari kedua variabel, dan menggunakan periode tahun data sebanyak 5 tahun dengan lokasi penelitian di Kota Medan.
--	--------------------	--	--	---

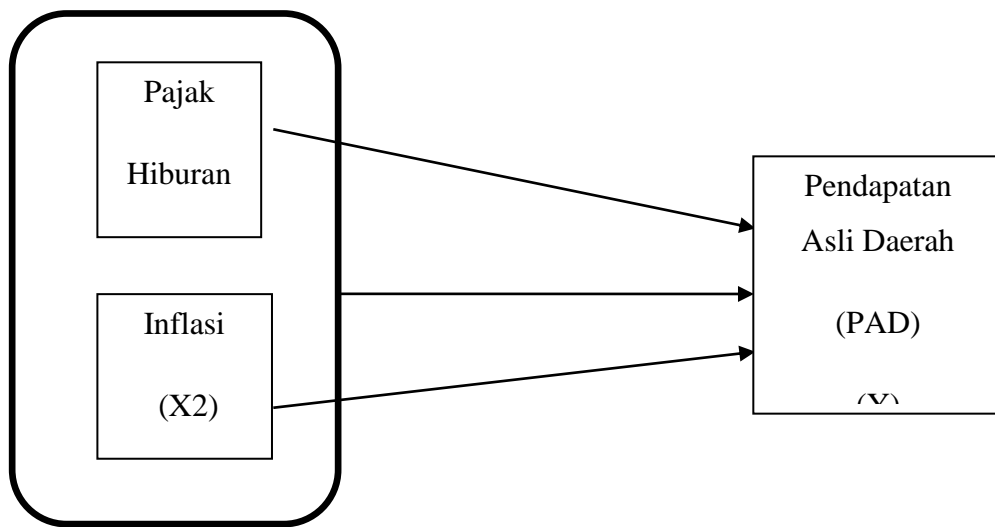
C. Kerangka Teoritis

Kerangka berpikir adalah alur yang menggambarkan proses riset secara keseluruhan, teori serta kajian pustaka yang dikaitkan dengan masalah yang dihadapi dalam perumusan masalah penelitian ini. Dengan demikian, pembaca langsung mendapat gambaran menyeluruh tentang riset dengan melihat kerangka berpikir.

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas:

1. Pendapatan Daerah bersumber dari:
 - a. Pendapatan asli daerah PAD bersumber dari:
 - 1) Pajak daerah
 - 2) Retribusi daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) Lain- lain PAD yang sah
 - b. Dana perimbangan dan
 - c. Lain- lain pendapatan
2. Pembiayaan bersumber dari:
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah
 - b. Penerimaan pinjaman daerah
 - c. Dana cadangan daerah
 - d. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pemerintah kota medan harus mampu menggali sumber- sumber keuangan daerah. Hal ini disebabkan kota medan memiliki sumber daya alam sehingga perolehan dana perimbangannya relatif besar, sehingga harus mampu meningkatkan sumber potensi keuangan dari pajak daerah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah serta keterangan di atas maka dapat digambarkan sebuah kerangka berpikir penelitian sebagai berikut:



Gambar 2.1 Model Kerangka Berpikir

Keterangan:

- : Pengaruh Pajak Hiburan (X₁) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y), Pengaruh Inflasi (X₂) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).
- : Pengaruh Pajak Hiburan (X₁) dan Inflasi (X₂) terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y).

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa terdapat pengaruh positif Pajak Hiburan dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

D. Hipotesa

Hipotesa adalah penjelasan sementara tentang suatu tingkah laku, gejala – gejala, atau gejala tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi. Berdasarkan kerangka berpikir yang telah dijelaskan diatas, maka penulis membuat hipotesa yang akan diuji sebagai berikut :

- Ho1 : Tidak terdapat pengaruh antara pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2013 – 2015.
- Ha1 : Terdapat pengaruh antara pajak hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2013 – 2015
- Ho2 : Tidak terdapat pengaruh antara inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2013 – 2015
- Ha2 : Terdapat pengaruh antara inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2013 – 2015
- Ho3 : Tidak terdapat pengaruh antara pajak hiburan dan inflasi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2013 – 2015
- Ha3 : Terdapat pengaruh antara pajak hiburan dan inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan Tahun 2013 – 2015

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan karya tulis ilmiah yang bertujuan untuk menjawab permasalahan apakah pajak hiburan yang dalam penelitian ini disebut X1 dan inflasi yang dalam penelitian ini disebut X2 berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan pada tahun 2013 sampai tahun 2015 yang kemudian disebut Y. Dalam merumuskan masalah yang ingin dijawab, penulis melakukan pengumpulan data dengan teknik dokumentasi berupa dokumen dari lembaga terkait yang dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, penelitian kuantitatif adalah jenis penelitian yang dapat diklasifikasikan, dapat diamati, dapat diukur, hubungan antar variabel bersifat sebab akibat, penelitian kemudian memuat permasalahan yang ada, merumuskan hipotesa, mengumpulkan data dan mengolahnya kemudian mengambil sebuah keputusan³⁵. Penelitian ini menggunakan data olahan interpolasi bulanan dari tahun 2013, 2014 dan 2015 kemudian diolah menggunakan alat *E View 9* untuk menguji pengaruh diantara variabel penelitian. Penelitian ini pada akhirnya akan menghasilkan kesimpulan atas permasalahan penelitian dan memunculkan saran dari temuan penelitian kepada pihak terkait.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka penulis mengadakan penelitian pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, No. 10, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143, Indonesia.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung; Alfabeta, 2013, hlm.26

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei sampai dengan oktober 2017. Dalam Penelitian ini penulis membahas Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan 2013 – 2015.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah data yang menjadi perhatian kita dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang kita tentukan, keseluruhan subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penerimaan pendapatan daerah Kota Medan 2013 – 2015.

2. Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak daerah selama 3 tahun yaitu dari tahun 2013 - 2015 di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Data tersebut telah dirubah dalam bentuk data bulanan yang didapatkan melalui proses interpolasi sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 buah.

D. Data Penelitian

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah dan di analisis menggunakan tehnik perhitungan matematika atau statistika.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh perantara, berupa bukti, catatan, atau laporan historis, majalah, artikel yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan dan

yang tidak dipublikasikan.³⁶ Data yang bersifat *time series* yaitu data- data yang menggunakan angka- angka dalam bentuk berkala. Sumber data diperoleh dari data- data yang terdapat di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan kurun waktu 2013- 2015 yang kemudian diolah dalam bentuk data bulanan. Disamping itu, data lainnya diperoleh dari buku bacaan, karya ilmiah, laporan penelitian, serta jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung ke badan – badan ataupun instansi yang terkait serta penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data – data melalui bahan – bahan kepustakaan berupa tulisan – tulisan ilmiah, jurnal, laporan – laporan penelitian, artikel dan data – data elektronik yang bersifat *online* (internet), yang berhubungan dengan topik yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan pencatatan langsung berupa data *time series* dalam kurun waktu 2013 – 2015, dimana data tersebut telah dirubah dalam bentuk data bulanan yang didapatkan melalui proses interpolasi sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini berjumlah 36 buah.

F. Defenisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang memberikan arti yang diperlukan untuk mengukur suatu variabel. Adapun yang menjadi definisi operasional dari dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Terikat (Y)

Pendapatan Asli Daerah yang dimaksud adalah jumlah pendapatan yang diterima Kota Medan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 berdasarkan laporan keuangan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Kota Medan.

³⁶Indra Maipita, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, (Yogyakarta: Digibooks, 2010) hlm 110.

2. Variabel Bebas (X)

- a. Pajak hiburan (X_1) yang dimaksud adalah jumlah penerimaan pajak yang berasal dari pajak yang dibayar mall, tempat karaoke, bioskop, klub malam dan pagelaran seni di Kota Medan.
- b. Inflasi (X_2) yang dimaksud adalah angka inflasi umum Kota Medan pada tahun 2013, 2014 dan 2015.

G. Teknik Analisis data

Metode analisis data yang digunakan dalam menganalisis besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat digunakan analisis regresi linear berganda dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil Biasa (*Ordinary Least Square*). Pengolahan data dibantu dengan program E-Views 9.0. Analisis ini dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Uji Statistik Deskriptif

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan rumusan statistik, yaitu statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan informasi hanya mengenai data yang dipunyai dan tidak menarik kesimpulan lebih banyak dan lebih jauh dari data yang ada. Ukuran yang digunakan dalam deskripsi antara lain berupa: rata-rata, median, modus, dan standar deviasi.

2. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik

Uji penyimpangan asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan pada regresi linier klasik untuk melihat keadaan dari model estimasi yang terdiri dari uji normalitas data, uji autokorelasi dan uji heterokedastisitas.

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Pengujian normalitas akan dilakukan dengan menggunakan *one-sample Kolmogorov Smirnov Test*, akan dilihat dari nilai

probabilitasnya, jika probabilitasnya $> 0,05$ data terdistribusi normal. Apabila data tidak terdistribusi secara normal maka dilakukan transformasi data.³⁷

b. Autokorelasi

Autokorelasi terjadi bila error term (μ) dari periode waktu yang berbeda (observasi data *cross section*) berkorelasi atau dapat juga dikatakan adanya hubungan atau korelasi antara residual yang sekarang dengan yang masa lalu. Dikatakan bahwa error term berkorelasi atau mengalami korelasi serial jika:

Variabel (ϵ_i, ϵ_j) $\neq 0$; untuk $i \neq j$, dalam hal ini dikatakan memiliki masalah autokorelasi.

Ada beberapa cara untuk mengetahui keberadaan autokorelasi, yaitu dengan cara:

- 1) Dengan memplot grafik
- 2) Dengan Durbin-Watson (Uji D-W test)

$$D\text{-hitung} = \frac{\sum (e_t - (e_{t-1}))^2}{\sum e^2_t}$$

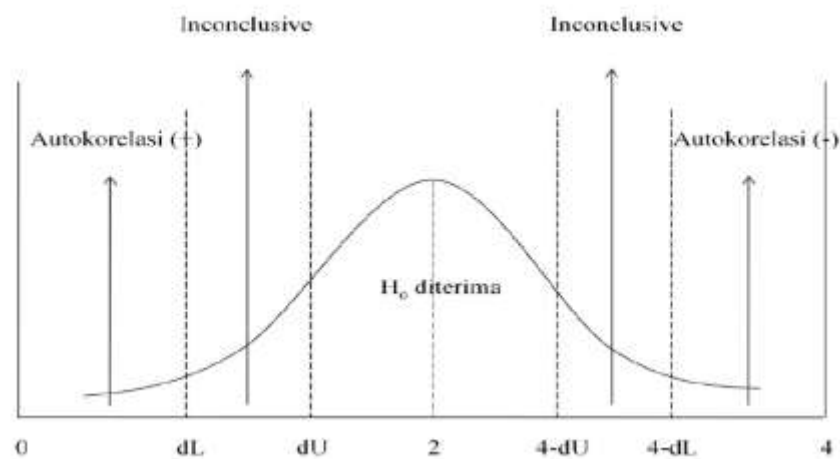
Dengan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$, artinya tidak ada autokorelasi

$H_a : \rho \neq 0$, artinya terdapat autokorelasi

Dengan jumlah sampel tertentu dan jumlah variabel independen tertentu diperoleh nilai kritis d_l dan d_u dalam tabel distribusi Durbin-Watson untuk berbagai nilai. Hipotesis yang digunakan adalah:

³⁷Wiratna sujarweni, *SPSS untuk paramedis*, (Yogyakarta:Gaya Media: 2012), hlm 55



Gambar 3.1 Kurva Uji DW Statistik

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada korelasi

$Dw < d_l$: Tolak H_0 (ada korelasi positif)

$Dw > 4 - d_l$: Tolak H_0 (ada korelasi negatif)

$d_u < dw < 4 - d_u$: Terima H_0 (tidak ada autokorelasi)

$d_l \leq dw \leq d_u$: Pengujian tidak bisa disimpulkan

(*inconclusive*)

$(4 - d_u) \leq dw \leq (4 - d_l)$: Pengujian tidak bisa disimpulkan

c. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi apakah terdapat heteroskedastisitas pada model regresi, dapat dilihat pada uji *White* pada Eviews.

Uji Hipotesis:

H_0 : Tidak ada heteroskedastisitas

H_1 : Ada heteroskedastisitas

Pengujian:

Jika $p\text{-value} < \alpha = 1\%$ maka H_0 ditolak

Jika $p\text{-value} > \alpha = 1\%$ maka H_0 diterima

Tidak terjadi heteroskedastisitas jika $p\text{-value} > \alpha = 1\%$

3. Uji Kesesuaian (*Test Goodness of Fit*)

Test Goodness of Fit merupakan uji koefisien determinasi atau nilai **R**-square yang menjelaskan bahwa secara bersama – sama variabel independen mampu memberi penjelasan perkembangan variabel dependen.

a. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat seberapa besar kemampuan variabel independen secara bersama dapat memberi penjelasan terhadap variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara 0 sampai 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Jika R^2 semakin besar (mendekati 1) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh yang besar terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika R^2 semakin kecil (mendekati 0) maka dapat dikatakan bahwa pengaruh variabel bebas kecil terhadap variabel terikat.

b. Uji T-Statistik (Uji Parsial)

Uji T-Statistik merupakan suatu pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah masing – masing koefisien regresi signifikan atau tidak terhadap variabel dependen dengan menganggap variabel independen lainnya konstan. Dalam uji ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : b_i = 0$

$H_a : b_i \neq 0$

Dimana b_i adalah koefisien variabel independen ke-I nilai hipotesis, biasanya b dianggap = 0, artinya tidak ada pengaruh variabel X_1 terhadap Y . Bila nilai $t\text{-hitung} > t\text{-tabel}$, maka pada tingkat kepercayaan tertentu H_0 ditolak. Hal ini berarti bahwa variabel independen yang diuji berpengaruh nyata (signifikan) terhadap variabel dependen. Nilai $t\text{-hitung}$ dapat diperoleh dengan rumus sebagai berikut:

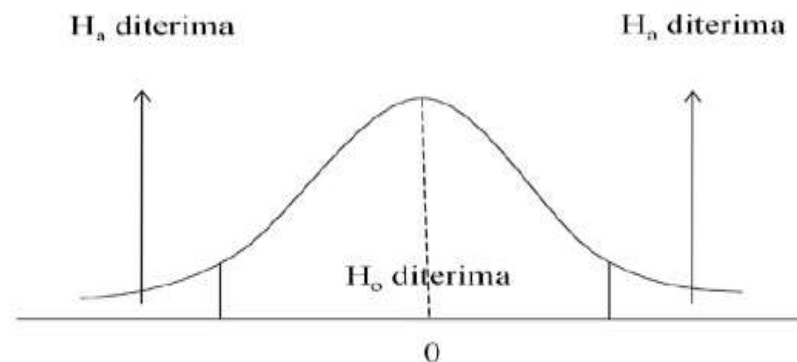
$$T_{\text{hitung}} = \frac{(b_i - b)}{S_{b_i}}$$

Dimana:

b_i = Koefisien Variabel ke-i

b = Nilai Hipotesis nol

S_{b_i} = Simpangan Baku dari Variabel Independen ke-i



Gambar 3.2 Kurva Uji T-Statistik

c. Uji F-Statistik (Uji Keseluruhan)

Uji F-Statistik ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

Untuk pengujian ini dilakukan hipotesis sebagai berikut:

H_0 ; $b_1 = b_2 = \dots = b_k = 0$ (tidak ada pengaruh)

H_a ; $b_i \neq 0 \dots i = 1$ (ada pengaruh)

Pengujian ini dilakukan untuk membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika F hitung (F^*) > F-tabel, maka H_0 ditolak. Artinya variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung diperoleh dengan rumus:

$$F_{\text{hitung}} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Dimana:

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Jumlah Variabel Independen ditambah Intercept dari suatu model

persamaan

n = Jumlah Sample

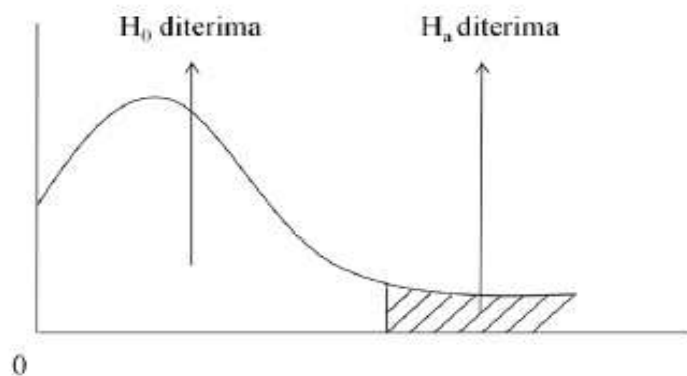
Dengan kriteria sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$

H_0 diterima jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$, artinya variabel independen secara bersama – sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$

H_a diterima jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, artinya variabel independen secara bersama – sama berpengaruh nyata terhadap variabel independen.



Gambar 3.3 Kurva Uji F-Statistik

4. Uji Model

Analisis regresi *linier* berganda adalah hubungan secara *linier* antara dua atau lebih variabel dependen (X_1, X_2) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara

variabel independen dengan variabel dependen apakah masing- masing variabel independen berhubungan positif atau negatif. ³⁸

Adapun fungsi estimasinya adalah sebagai berikut:

$$PAD = f (PH,I).....(1)$$

Kemudian fungsi tersebut dibentuk sebagai model ekonometrika dengan spesifikasi model sebagai berikut:

$$PAD = a + bPH - cI + \mu.....(2)$$

Dimana :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

a : *Intercept*

PH : Pajak Hiburan

I : Inflasi

b, c : Koefisien Regresi

μ : *Term of Error*

³⁸Duwi Priyatno, *teknik mudah dan cepat melakukan analisis data penelitian dengan SPSS dan tanya jawab ujian pendadaran*. (Yogyakarta: Gaya Media, 2010) hlm.77

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Gambaran Umum Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

a. Sejarah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Pada mulanya Badan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah suatu sub bagian pada bagian yang mengelola bidang penerimaan dan pendapatan daerah. Pada sub bagian ini belum terdapat sub seksi, karena pada saat itu wajib pajak/ wajib retribusi yang berdomisili di daerah kota Medan belum begitu banyak.

Dengan memperhitungkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan di kota medan melalui peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut dirubah menjadi bagian pendapatan. Pada bagian pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola penerimaan pajak dan retribusi daerah yang merupakan kewajiban para wajib pajak/ wajib retribusi didalam daerah kota Medan, yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Amplas, Medan Denai, Medan Tembung, Medan Timur, Medan Kota, Medan Area, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal dan lainnya.³⁹

Sehubungan dengan intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD No. 7/12/41-10 tentang penyelenggaraan Struktur Organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia. Maka Pemerintah kota Medan, berdasarkan peraturan Daerah No. 12 tahun 1978 menyesuaikan dan membentuk struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang baru. Didalam struktur organisasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang baru ini dibentuklah seksi- seksi administrasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, juga dibentuk Bagian Tata Usaha yang membawahi 3 (tiga) Kepala sub bagian yaitu sub sektor perpajakan, retribusi daerah, dan pendapatan daerah lainnya yang merupakan kontribusi yang cukup penting bagi pemerintah daerah dalam mendukung dan memelihara pembangunan dan didalam peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

³⁹ *Badan pengelolaan pajak dan retribusi kota Medan*

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah kota Medan melakukan penataan organisasi yang ditetapkan dengan peraturan daerah kota Medan Nomor 04 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas- dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah kota Medan, salah satu diantaranya adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Sebagai unsur pelaksana pemerintah kota Medan dalam bidang pungutan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lainnya. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, berdasarkan kutipan tersebut jelas diketahui salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari pajak daerah. Pajak Daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik yang diatur dalam Undang- undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagai perubahan atas Undang- undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dimana Pajak Daerah terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

1) Pajak Provinsi yang terdiri dari:

- a) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- b) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- c) Pajak Air Permukaan
- d) Pajak Rokok

2) Pajak Kabupaten dan Kota yang terdiri dari:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak penerangan Jalan
- f) Pajak Parkir
- g) Pajak Air Tanah
- h) Pajak Sarang Burung Walet

b. Lokasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah

Lokasi Kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah berada di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, No. 10, Pangkalan Masyhur, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara 20143, Indonesia.

c. Visi Dan Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

1) Visi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ialah:

“ Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai andalan pembiayaan pembangunan daerah “

2) Misi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan ialah:

- a) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelola pendapatan daerah.
- b) Meningkatkan sarana dan prasarana dinas.
- c) Intensifikasi dan Ekstensifikasi subyek dan obyek pendapatan daerah.
- d) Meningkatkan penegakkan hukum.
- e) Meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kewajibannya dalam membayar pajak daerah.⁴⁰

2. Pendapatan Asli Kota Medan

Sumber – sumber pendapatan Asli Daerah Kota Medan yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Pendapatan Asli Daerah Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan perusahaan daerah yang dipisahkan dan lain- lain Pendapatan Asli Daerah.

Tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan dihitung dengan membandingkan antara realisasi penerimaan p Pendapatan Asli Daerah dengan target Pendapatan Asli Daerah. Apabila perhitungan efektifitas Pendapatan Asli Daerah menghasilkan angka atau persentase melebihi 100%, maka Pendapatan Asli Daerah semakin efektif atau dengan kata lain kinerja penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan semakin baik.

⁴⁰ *Badan pengelolaan pajak dan retribusi kota Medan*

Dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah perlu diadakan pengukuran sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah. Ada beberapa indikator yang bisa digunakan untuk menilai Pajak dan retribusi Daerah, yaitu:

1) Hasil

Memadai tidaknya hasil suatu Pajak/Retribusi dalam kaitannya dengan berbagai layanan yang dibiayainya, stabilitas dan mudah tidaknya meperkirakan besarnya hasil Pajak/Retribusi tersebut, perbandingan hasil Pajak/Retribusi dengan biaya pungut, dan elastisitas hasil Pajak/Retribusi terhadap inflasi, penambahan penduduk, penambahan pendapatan dan sebagainya.

2) Keadilan

Dalam hal ini dasar Pajak/Retribusi dan kewajiban membayarnya harus jelas dan tidak sewenang- wenang, pajak harus adil secara horizontal, artinya beban Pajak/Retribusi harus sama antara berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama, adil secara vertikal artinya beban Pajak harus lebih banyak ditanggung oleh kelompok yang memiliki sumber daya yang lebih besar, dan pajak haruslah adil dari suatu daerah ke daerah lain, kecuali memang suatu daerah mampu memberikan fasilitas pelayanan sosial yang lebih tinggi.

3) Efisiensi Ekonomi

Pajak/Retribusi Daerah hendaknya mendorong atau setidaknya tidaknya menghambat penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi, mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung, dan meperkecil beban lebih Pajak/Retribusi.

4) Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

Hal ini berarti, haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat memungut pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir pajak, pajak tidak mudah dihindari, dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain, Pajak Daerah hendaknya jangan mempertajam perbedaan- perbedaan antara daerah dari segi potensi ekonomi masing- masing, dan pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha Pajak Daerah.

Pendapatan Asli Daerah dapat dipandang sebagai salah satu indikator atau kriteria untuk mengurangi ketergantungan suatu daerah kepada pusat. Prinsipnya semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD akan menunjukkan semakin kecil ketergantungan daerah kepada pusat. Menurut santoso, bahwa proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total penerimaan merupakan indikasi derajat kemandirian keuangan sutau Pemerintahan Daerah.

Dalam peneilitian ini yang di pertimbangkan dalam menentukan efektifitas hanya pencapaian target. Sedangkan untuk tujuan lain, seperti keadilan, ketepatan, waktu pembayaran dan kepastian hukum di abaikan.

Tabel 4.1

Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan Tahun 2013-2015

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas (%)	Pertumb. (%)
2013	Rp 1.578.247.819.724,32	Rp 1.206.169.709.147,73	76,42	-
2014	Rp 1.678.116.623.125 ,00	Rp 1.384.246.114.729,62	82,49	14,76
2015	Rp 1.794.704.774.012 ,45	Rp 1.413.442.053.247,36	78,76	2,1
	rata- rata		79,22	8,43

Sumber: Badan Pengelolaan pajak dan retribusi kota Medan (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.1 untuk mengetahui apakah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sudah memenuhi target yang telah di tetapkan maka di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 tahun 1994 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan, Standarisasi Tingkat Efektivitas ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Koefisien efektivitas bernilai diatas 100% berarti sangat efektif.
- 2) Koefisien efektivitas bernilai antara 90% - 100% berarti efektif.
- 3) Koefisien efektivitas bernilai antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
- 4) Koefisien efektivitas bernilai antara 60% - 80% berarti kurang efektif.

5) Koefisien efektivitas bernilai dibawah 60% berarti tidak efektif.

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Dari hasil perhitungan tabel 4.1 diatas dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2013, 2014 dan 2015 mengalami penurunan, dimana rasio efektifitas menunjukkan kenaikan pada tahun 2014 sebesar 82.49% yang merupakan peningkatan dari tahun 2013 sebesar 76,42% namun tidak dilanjutkan pada tahun selanjutnya yang mengalami penurunan menjadi 78.76%, dimana secara rata – rata ditemukan bahwa rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2012, 2014 dan 2015 sebesar 79,22%, hal ini tentu disebabkan dari peresentase realisasi penerimaan tidak sebanding dengan target yang ditetapkan. Untuk mengetahui rasio pertumbuhan PAD dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{PAD\ t1 - PAD\ t0}{PAD\ t0}$$

Pada tabel 4.1 diatas, rasio pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan tahun 2013, 2014 dan 2015 secara rata – rata sebesar 8,43%. Angka ini merupakan pencapaian yang kurang baik, dimana angka 14,76% sebagai rasio pertumbuhan yang dihasilkan dari tahun 2013 dan 2014 menurun drastis ke angka 2,1% pada tahun 2015 yang mengakibatkan rasio pertumbuhan PAD Kota Medan secara umum mengalami penurunan yang signifikan.

b. Pajak Hiburan Kota Medan

Peraturan kota Medan nomor 07 tahun 2011 mengartikan pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang terdiri dari tontonan, pertunjukan, permainan dan yang dinikmati dengan dipungut biaya.

Tabel 4.2

Target dan Realisasi pajak hiburan kota Medan tahun 2013- 2015

Tahun	Target	Realisasi	Efektifitas	Pertumbuhan
			(%)	(%)
2013	Rp 35.308.417.000	Rp 26.404.053.135	74,78	-
2014	Rp 35.308.417.000	Rp 29.504.654.723	83,56	11,74
2015	Rp 984.597.900	Rp 262.565.328	26,67	-9,9
Rata- rata			61,67	0,92

Sumber: Badan pengelolaan pajak dan retribusi kota Medan (data diolah)

Berdasarkan tabel 4.2 untuk mengetahui apakah penerimaan pajak hiburan sudah memenuhi target yang telah ditetapkan maka di hitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hiburan}} \times 100\%$$

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pajak Hiburan yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 persen. Semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Dari hasil perhitungan tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa tingkat penerimaan pajak hiburan Kota Medan tahun 2013, 2014 dan 2015 secara umum mengalami penurunan dengan rasio efektifitas 61,67%. Pada tahun 2013 penerimaan pajak hiburan mencatatkan rasio efektifitas sebesar 74,78% yang kemudian dilanjutkan dengan baik pada tahun 2014 dengan angka sebesar 83,56%, namun angka rasio ini mengalami penurunan drastis pada tahun 2015 yang hanya sebesar 26,67%. Penurunan ini disebabkan realisasi pajak hiburan tahun 2015 sebesar Rp262.565.328 turun dari angka Rp29.504.654.723 pada tahun sebelumnya dan target pajak hiburan pada tahun 2015 sebesar Rp984.597.000 turun dari angka Rp35.308.417.000 pada tahun sebelumnya.

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{\text{Pajak Hiburan } t1 - \text{Pajak Hiburan } t0}{\text{Pajak Hiburan } t0}$$

Pada tabel 4.2 diatas dapat dilihat bahwa rata – rata rasio pertumbuhan pajak hiburan Kota Medan tahun 2012, 2014 dan 2015 sebesar 0,92%. Angka ini dihasilkan oleh akumulasi dari rasio pertumbuhan sebesar 11,74% pada tahun 2014, namun mengalami penurunan drastis ke angka -9,9% pada tahun 2015 yang disebabkan oleh realisasi dan target pajak hiburan yang turun dari sebelumnya untuk kedua variabel tersebut.

c. Inflasi Kota Medan

Menurut pengertian Bank Indonesia, secara sederhana inflasi adalah meningkatnya harga harga secara umum dan terus menerus. Perkembangan inflasi

di Kota Medan pada tahun 2011 sampai tahun 2013 dapat dilihat dari tabel berikut.

Tabel 4.3 Perkembangan Inflasi Kota Medan 2011 – 2013

Bulan	Tahun		
	2013	2014	2015
Januari	1.21	1	-0.35
Februari	0.80	-0.59	-1.36
Maret	0.42	-0.34	-0.01
April	0.74	0.34	0.96
Mei	0.34	0.30	1.01
Juni	1.28	0.60	0.77
Juli	2.74	0.80	0.82
Agustus	0.50	0.67	0.59
September	0.12	0.23	2.44
Oktober	1	0.71	-0.33
November	0.61	1.75	0.53
Desember	0.50	2.53	1.37

Sumber: Bps kota medan 2017

Dari data tabel 4.3 dapat dilihat perkembangan inflasi Kota Medan pada tahun 2013, 2014 dan 2015 mengalami fluktuasi, dimana angka tertinggi pada periode tersebut terjadi di bulan Juli tahun 2013 sebesar 2.74 sedangkan angka terendah terjadi di bulan Maret tahun 2015 sebesar -0.01, secara umum terlihat angka inflasi mengalami peningkatan pada Quartal IV yaitu di bulan Oktober, November dan Desember, meskipun inflasi diatas angka 2 persen hanya terjadi di bulan Desember tahun 2014, lebih kecil dibandingkan 2 kali angka inflasi diatas 2 persen terjadi pada periode tahun data pada Quartal III yaitu di bulan Juli, Agustus dan September, dimana inflasi diatas 2 persen terjadi pada bulan Juli tahun 2013 dan bulan Desember tahun 2015.

3. Hasil Uji Statistik

a. Uji Asumsi Klasik

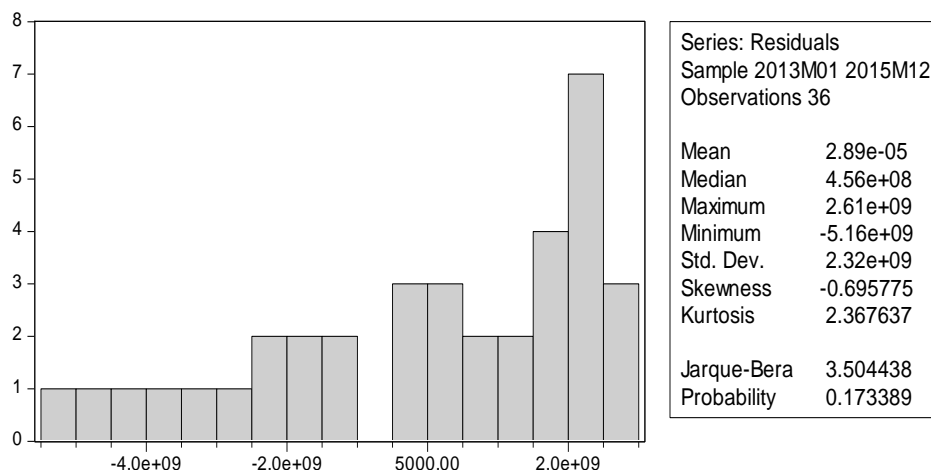
Uji penyimpangan asumsi klasik merupakan pengujian yang dilakukan pada regresi linier klasik untuk melihat keadaan dari model estimasi yang terdiri dari multikolinearitas, autokorelasi dan heterokedastisitas.

1) Uji Normalitas

Uji berdistribusi normal adalah uji untuk mengukur apakah data kita memiliki distribusi normal sehingga dapat dipakai dalam statistik parametrik. Pendugaan persamaan dengan menggunakan metode *Ordinary Least Square* harus memenuhi sifat kenormalan, karena jika tidak normal dapat menyebabkan varians *infinite* (ragam tak hingga atau ragam yang sangat besar). Pada program *E – Views 9.0*, pengujian normalitas dilakukan dengan *Jarque - Bera test*. *Jarque - Bera test* mempunyai distribusi chi square dengan derajat bebas dua. Jika hasil *Jarque - Bera test* lebih besar dari nilai *chi square* pada $\alpha = 1\%$, maka tolak hipotesis nul yang berarti tidak berdistribusi normal. Jika hasil *Jarque - Bera test* lebih kecil dari nilai *chi square* pada $\alpha = 1\%$, maka terima hipotesis nul yang berarti *error term* berdistribusi normal.

Untuk mendeteksi residualnya berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai *Jarque - Bera* (JB) dengan χ^2 tabel, yaitu:

- Jika nilai $JB > \chi^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal
- Jika nilai $JB < \chi^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi normal



Gambar 4.1: Uji Normalitas

Dari hasil output uji normalitas pada gambar 4.6, bahwa nilai JB sebesar 3.504438. Karena $3.504438 < 7,56$ maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Selain itu, tingkat probability sebesar 0.173389 ($p - \text{value} > 1\%$) maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

2) Autokorelasi

Autokorelasi terjadi apabila *error term* (μ) dari periode waktu yang berbeda (observasi data *cross section*) berkorelasi. Untuk menguji keberadaan autokorelasi dapat digunakan uji Durbin – Watson. Uji D – W dimaksudkan untuk mengetahui apakah didalam model yang digunakan terdapat autokorelasi diantara variabel – variabel yang diamati.

Langkah – langkah yang dilakukan sebagai berikut:

a) Hipotesa: $H_0 : b_1 = 0$

$H_a : b_1 \neq 0$

b) $\alpha = 5\%$, $k = 2$, $n = 36$, maka:

$$dl = 1.3537 \quad 4 - dl = 2.6463$$

$$du = 1.5872 \quad 4 - du = 2.4128$$

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada korelasi

$Dw < dl$: Tolak H_0 (ada korelasi positif)

$Dw > 4 - dl$: Tolak H_0 (ada korelasi negatif)

$du < dw < 4 - du$: Terima H_0 (tidak ada autokorelasi)

$dl \leq dw \leq du$: Pengujian tidak bisa disimpulkan
(*inconclusive*)

$(4-du) \leq dw \leq (4 - dl)$: Pengujian tidak bisa disimpulkan
(*inconclusive*)

c)

d) Statistik Penguji D – W = 2.1031

Tabel 4.5 Uji DW Statistik

Dependent Variable: PAD

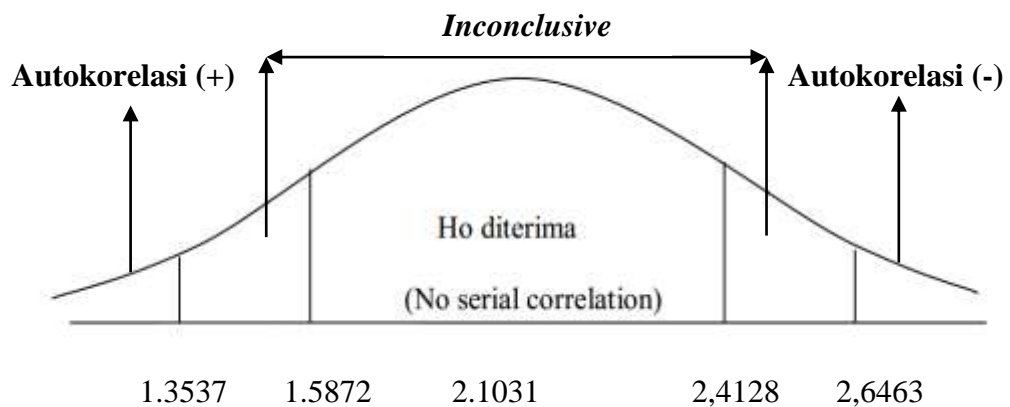
Method: Least Squares

Date: 10/13/17 Time: 14:32

Sample: 2013M01 2015M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.51E+08	5.53E+09	-0.153819	0.8787
PH	46.49463	2.268002	20.50026	0.0000
I	-5.61E+08	4.91E+08	-1.142896	0.2613
R-squared	0.928195	Mean dependent var		1.11E+11
Adjusted R-squared	0.923843	S.D. dependent var		8.67E+09
S.E. of regression	2.39E+09	Akaike info criterion		46.10974
Sum squared resid	1.89E+20	Schwarz criterion		46.24170
Log likelihood	-826.9753	Hannan-Quinn criter.		46.15580
F-statistic	213.2889	Durbin-Watson stat		2.103077
Prob(F-statistic)	0.000000			



Gambar 4.2 Kurva Uji DW Statistik

Berdasarkan hasil regresi dapat diperoleh bahwa $DW - \text{hitung} = 2.1031$ berada pada posisi $du < dw < 4 - du$ atau $(1.5872 < 2.1031 < 2,4128)$ maka terima H_0 artinya tidak ada autokorelasi dari model estimasi ataupun antara nilai pengganggunya pada tingkat kepercayaan 99% ($\alpha = 1\%$).

3) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Untuk mendeteksi apakah terdapat heteroskedastisitas pada model regresi, dapat di lihat pada uji *white* yang dimiliki oleh *evIEWS*.

Uji Hipotesis:

H_0 : Tidak ada heteroskedastisitas

H_1 : Ada heteroskedastisitas

Pengujian:

Jika $p - \text{value} < \alpha = 1\%$ maka H_0 ditolak

Jika $p - \text{value} > \alpha = 1\%$ maka H_0 diterima

Tidak terjadi heteroskedastisitas jika $p - \text{value} > \alpha = 1\%$

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.807125	Prob. F(2,33)	0.4548
Obs*R-squared	1.678874	Prob. Chi-Square(2)	0.4320
Scaled explained SS	0.964677	Prob. Chi-Square(2)	0.6173

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 10/13/17 Time: 14:56

Sample: 2013M01 2015M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.04E+18	7.43E+18	-0.543155	0.5907
PH ²	1.591075	1.252593	1.270224	0.2129
I ²	-6.05E+16	5.86E+17	-0.103249	0.9184
R-squared	0.046635	Mean dependent var		5.25E+18
Adjusted R-squared	-0.011144	S.D. dependent var		6.23E+18
S.E. of regression	6.26E+18	Akaike info criterion		89.48027
Sum squared resid	1.29E+39	Schwarz criterion		89.61222
Log likelihood	-1607.645	Hannan-Quinn criter.		89.52632
F-statistic	0.807125	Durbin-Watson stat		0.294338
Prob(F-statistic)	0.454751			

Dari hasil output uji heteroskedastisitas pada table 4.6, diketahui bahwa Obs*R-squared = 1.678874 dengan p – value = 0.4320 > $\alpha = 1\%$ maka H_0 ditolak, sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas di dalam model ini.

b. Uji Koefisien Determinan (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) adalah koefisien yang menyatakan hubungan yang dijelaskan oleh variabel dependen dan variabel independen. Koefisien Determinasi (R^2) dari model diatas adalah 0.928195 atau 92,82%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel bebas (*independent*) seperti X1 (Pajak Hiburan), X2 (Inflasi) secara bersama – sama memberikan penjelasan terhadap variabel terikat (*dependent*) yaitu Y (jumlah PAD) sebesar 92,82% sedangkan sisanya sebesar 7,18 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam model estimasi.

c. Uji T – Statistik (Uji Parsial)

Untuk menguji apakah variabel – variabel bebas (*independent*) diatas secara parsial berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (*dependent*) maka digunakan Uji T – Statistik adapun ujinya dapat didefinisikan sebagai berikut.

Ho : $b_1 = 0$

Ha : $b_1 \neq 0$

b. Variabel Pajak Hiburan (PH)

Hipotesa: Ho : $b_1 = 0$

Ha : $b_1 \neq 0$

Kriteria :

Jika nilai uji t – statistik bernilai positif:

Ho diterima apabila $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$

Ha diterima apabila $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$

Jika nilai uji t – statistik bernilai negatif:

Ho diterima apabila $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$

Ha diterima apabila $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$

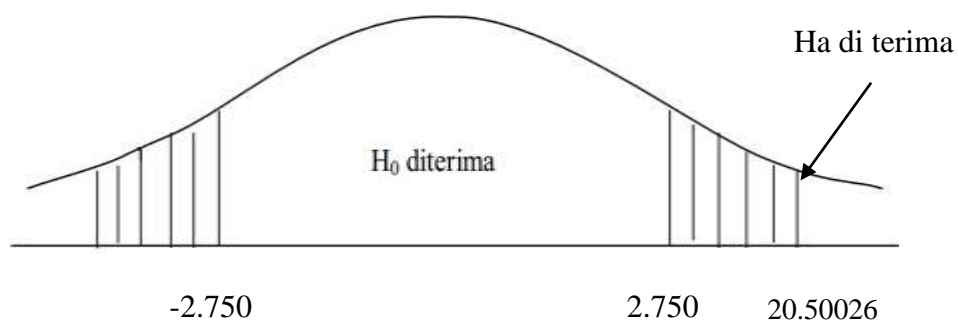
Dari hasil analisis regresi diketahui $t - \text{hitung} = 20.50026$

$\alpha = 1\%$;

$df = n - k$

$= 36 - 2 = 34$

Maka $t - \text{tabel} = 2.750$



Gambar 4.3

Kurva Uji T-Statistik Variabel Pajak Hiburan

Dari hasil estimasi regresi dapat diketahui Pajak Hiburan signifikan pada $\alpha = 1\%$ dengan $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$ ($20.50026 > 2.750$) dengan demikian H_a diterima pada nilai uji $t - \text{statistik}$ bernilai positif. Artinya variabel Pajak Hiburan (PH) berpengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tingkat kepercayaan 99%.

c. Variabel Inflasi (Inflasi)

Hipotesa: $H_0 : b_1 = 0$

$H_a : b_1 \neq 0$

Kriteria:

Jika nilai uji $t - \text{statistik}$ bernilai positif:

H_0 diterima apabila $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$

H_a diterima apabila $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$

Jika nilai uji $t - \text{statistik}$ bernilai negatif:

H_0 diterima apabila $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$

H_a diterima apabila $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$

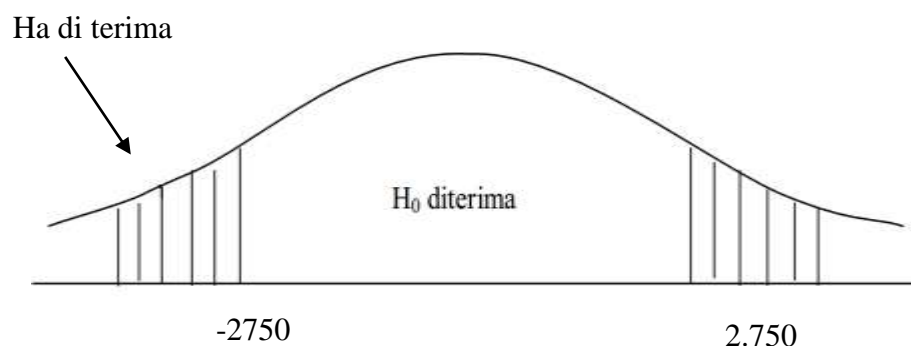
Dari hasil analisis regresi diketahui $t - \text{hitung} = -1.142896$

$\alpha = 1\%$

$df = n - k$

$= 36 - 2 = 34$

Maka $t - \text{tabel} = 2.750$



Gambar 4.4

Kurva Uji T-Statistik Variabel inflasi

Dari hasil estimasi regresi dapat diketahui bahwa inflasi signifikan pada saat $\alpha = 1$ dengan $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$ ($-1.142896 > -2.750$) dengan demikian H_a diterima pada nilai uji $t - \text{statistik}$ bernilai positif, artinya variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan pada tingkat kepercayaan 99%.

d. Uji F – Statistik (Uji Keseluruhan)

Uji F – Statistik dilakukan untuk mengetahui apakah variabel Pajak Hiburan dan Inflasi mampu secara serentak atau secara bersamaan mempengaruhi PAD Kota Medan.

Hipotesa: $H_0 : b_1 = b_2 = 0$

$H_a : b_1 \neq b_2$

Kriteria:

H_0 diterima apabila $F - \text{hitung} < F - \text{tabel}$

H_a diterima apabila $F - \text{hitung} > F - \text{tabel}$

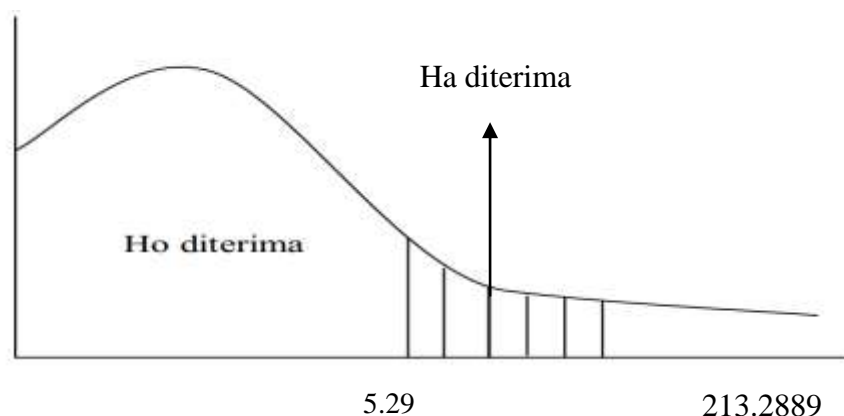
Dari hasil analisis regresi diketahui $F - \text{hitung} = 213.2889$

$\alpha = 1\%$; $df_1 = k - 1$; $df_2 = n - k$

$n = 36$; $k = 2$

$df_1 = 2$; $df_2 = 34$

Maka $F - \text{tabel} = 5.29$



Gambar 4.5 Kurva Uji F – Statistik

Berdasarkan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa F – hitung lebih besar dari F – tabel. Dengan demikian H_a diterima, artinya secara bersama – sama variabel pajak hiburan dan inflasi berpengaruh secara nyata terhadap jumlah Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan tingkat kepercayaan 99%.

e. Uji Model

Analisis regresi merupakan metode yang digunakan untuk menganalisa hubungan persamaan antara variabel. Model estimasi persamannya sebagai berikut:

$$PAD = a + bPH - cI + \mu$$

Dimana:

PAD : Pendapatan Asli Daerah dalam satuan juta rupiah

a : *Intercept*

PH : Pajak Hiburan dalam satuan juta rupiah

I : Inflasi dalam satuan persentase (%)

b, c : Koefisien Regresi

μ : *Term of Error*

Tabel 4.7

Hasil Estimasi Pajak Hiburan (PH) dan Inflasi (I) Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan

Dependent Variable: PAD

Method: Least Squares

Date: 10/13/17 Time: 14:32

Sample: 2013M01 2015M12

Included observations: 36

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-8.51E+08	5.53E+09	-0.153819	0.8787
PH	46.49463	2.268002	20.50026	0.0000
I	-5.61E+08	4.91E+08	-1.142896	0.2613
R-squared	0.928195	Mean dependent var		1.11E+11
Adjusted R-squared	0.923843	S.D. dependent var		8.67E+09
S.E. of regression	2.39E+09	Akaike info criterion		46.10974
Sum squared resid	1.89E+20	Schwarz criterion		46.24170
Log likelihood	-826.9753	Hannan-Quinn criter.		46.15580
F-statistic	213.2889	Durbin-Watson stat		2.103077
Prob(F-statistic)	0.000000			

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan dengan program *Eviews* ver.9 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.7 dapat dihasilkan estimasi sebagai berikut:

$$PAD = -8.51E+08 + 46.49463PH - 5.61E+08I + \mu$$

Interpretasi terhadap model atau persamaan regresi di atas, yaitu sebagai berikut :

- 1) Nilai *intercept* pendapatan asli daerah (PAD) sebesar $-8.51E+08$. Hal ini menunjukkan bahwa jika pajak hiburan dan inflasi bernilai nol maka PAD akan mengalami penurunan sebesar Rp 8,51-. milyar.
- 2) Nilai pajak hiburan (PH) berpengaruh positif terhadap PAD Kota Medan, hal ini ditunjukkan oleh koefisien pajak hiburan sebesar 46,49463. Artinya setiap kenaikan pajak hiburan sebesar Rp 1 milyar, maka akan meningkatkan PAD Kota Medan sebesar Rp 46,49 milyar selama kurun waktu 2013 – 2015.
- 3) Nilai Koefisien inflasi (I) berpengaruh negatif terhadap PAD Kota Medan, hal ini ditunjukkan pada koefisien inflasi sebesar -5,61. Artinya setiap kenaikan inflasi sebesar 1%, maka akan menurunkan PAD Kota Medan sebesar Rp 5,61 milyar selama kurun waktu 2013 – 2015.

B. Pembahasan

Berdasarkan penyajian data hasil penelitian, maka penulis akan membahas hasil penelitian sesuai dengan permasalahan yang diajukan. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 46,49 terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut didukung dengan nilai signifikan sebesar $\alpha = 1\%$ dengan $t - \text{hitung} > t - \text{tabel}$ ($20.50026 > 2.750$). Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa apabila variabel pajak hiburan mengalami kenaikan maka akan menyebabkan peningkatan pada variabel pendapatan asli daerah.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam merealisasikan pajak hiburan yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah adalah kurang baik. Hal tersebut didukung dengan tingkat rata – rata rasio efektifitas pajak hiburan kota Medan yang kurang dari 100% setiap

tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja dalam penerimaan pajak hiburan Kota Medan kurang baik. Karena realisasi pajak hiburan lebih kecil dari pada target yang di rencanakan atau yang di tetapkan. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% (persen).

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan badan pengelolaan pajak dan retribusi daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya adalah kurang baik. Hal tersebut didukung dengan selama tiga tahun realisasi pajak hiburan Kota Medan yang tidak tercapai. Pada tahun 2015 merupakan penerimaan realisasi pajak hiburan dengan capaian terburuk dengan hanya menyerap dana pajak hiburan sebesar 26,67%, dengan angka yang merosot ini menyebabkan penurunan rasio efektifitas dan rasio pertumbuhan pajak hiburan Kota Medan mengalami penurunan secara rata-rata. Dengan mengetahui pertumbuhan pajak hiburan, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap potensi – potensi daerah yang perlu mendapat perhatian.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukan bahwa Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan dengan koefisien sebesar -5.61 terhadap pendapatan asli daerah. Hal tersebut didukung dengan nilai signifikan sebesar $\alpha = 1\%$ dengan $t - \text{hitung} < t - \text{tabel}$ ($-1.142896 < -2.750$) jika bernilai negatif. Pengaruh ini menunjukkan adanya hubungan terbalik yang saling mempengaruhi antara inflasi dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan, dimana apabila variabel inflasi mengalami peningkatan maka akan menyebabkan penurunan pada variabel pendapatan asli daerah.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi keuangan yang ada mempengaruhi porsi pendapatan asli daerah Kota Medan, salah satunya adalah inflasi. Inflasi yang ada di Kota Medan sangat bervariasi dan fluktuatif, angka tertinggi terjadi pada bulan Juli tahun 2013 sebesar 2,74%, dimana sepanjang tahun 2013, 2014 dan 2015 terdapat beberapa bulan yang angka inflasinya diatas 2% yaitu Juli 2013, Desember 2014 dan September 2015. Kondisi inflasi yang fluktuatif ini memberikan pengaruh terhadap perubahan pola konsumsi masyarakat Kota Medan, dimana kenaikan harga – harga barang dan jasa secara umum akan mengakibatkan tindakan konsumsi yang lebih selektif dari masyarakat dan mendahulukan menabung daripada mengkonsumsi barang atau jasa. Kondisi ini akan berdampak tidak baik terhadap penerimaan pendapatan pemerintah dikarenakan lesunya perekonomian akan mengakibatkan transaksi ekonomi di masyarakat menurun.

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukan bahwa pajak hiburan dan inflasi masing – masing berpengaruh signifikan dengan koefisien sebesar 46,49

dan -5.61% terhadap pendapatan asli daerah. Untuk variabel pajak hiburan hal tersebut didukung dengan nilai signifikan sebesar $\alpha = 1\%$ dengan $F - \text{hitung} >$ dari $F - \text{tabel}$ ($213.2889 > 5.29$). Pengaruh positif ini menunjukkan bahwa apabila variabel pajak hiburan mengalami kenaikan maka akan menyebabkan peningkatan pada variabel pendapatan asli daerah serta adanya hubungan negatif inflasi yang artinya apabila variabel inflasi mengalami kenaikan akan menurunkan pendapatan asli daerah.

Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah dan variabel inflasi terhadap pendapatan asli daerah. Pengelolaan yang lebih baik diharapkan agar pendapatan asli daerah yang sejak tahun 2013 sampai tahun 2015 belum pernah mencapai target yang ditetapkan. Perkembangan pendapatan asli daerah Kota Medan secara umum meningkat meskipun secara keseluruhan belum mencapai target. Untuk menilai pencapaian kinerja pemerintah daerah dilihat juga berdasarkan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah, dalam hal ini rasio pertumbuhan Kota Medan pada tahun 2015 mengalami penurunan tajam sebesar 12 % dari tahun 2014.

Hubungan terbalik antara inflasi dan pendapatan asli daerah merupakan kesimpulan teori yang ada, dalam penelitian ini terlihat berbeda dimana meskipun angka inflasi mengalami penurunan semenjak tahun 2013, 2014 dan 2015 sebesar 10,09%, 8,24% dan 3,32% namun penerimaan pajak hiburan tidak menghasilkan pencapaian yang signifikan, dimana hal ini kemudian mempengaruhi pendapatan asli daerah Kota Medan yang belum pernah mencapai target seperti yang diharapkan.

Penerimaan pajak hiburan berbanding lurus atau searah dengan pendapatan asli daerah, Sedangkan inflasi mempunyai arah negatif atau berbanding terbalik dengan pendapatan asli daerah. Hal ini sesuai dengan teori Harianto yang mengatakan bahwa semakin banyak penerimaan pajak hiburan semakin banyak pula pendapatan asli daerah dan teori dari Suseno dan Siti Astiyah yang mengemukakan semakin tinggi tingkat inflasi maka semakin rendah pendapatan asli daerah begitu juga sebaliknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masalah pertama penelitian ini adalah tentang pengaruh penerimaan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan Tahun 2013, 2014 dan 2015. Kenaikan pajak hiburan sebesar 1 milyar akan menghasilkan kenaikan PAD Kota Medan sebesar Rp 46.49 milyar sepanjang periode tahun 2013, 2014 dan 2015.

Masalah kedua penelitian ini adalah tentang pengaruh inflasi terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan Tahun 2013, 2014 dan 2015. Artinya Kenaikan inflasi sebesar 1% akan mengakibatkan penurunan pendapatan asli daerah Kota Medan sebesar Rp 5,61 milyar sepanjang periode tahun 2013, 2014 dan 2015.

Masalah ketiga penelitian ini adalah tentang pengaruh pajak hiburan dan inflasi terhadap pendapatan asli daerah Kota Medan. Berdasarkan hasil analisis penelitian dapat disimpulkan bahwa pajak hiburan berpengaruh positif dan signifikan sedangkan inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sehingga variabel pajak hiburan yang mengalami kenaikan akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan variabel inflasi yang mengalami kenaikan akan menurunkan pendapatan asli daerah. Variabel pajak hiburan dan inflasi memberikan pengaruh terhadap jumlah pendapatan asli daerah Kota Medan tahun 2013, 2014 dan 2015 sebesar 92,82% sedangkan sisanya sebesar 7,18% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model.

B. Saran

1. Sektor pajak daerah Kota Medan memberikan kontribusi terbesar pada Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dibandingkan sektor-sektor lainnya, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan efektifitas mekanisme penungutan pajak sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, seperti deregulasi persyaratan pembayaran pajak yang lebih sedikit, meningkatkan literasi pajak terhadap pelaku bisnis hiburan dengan mengirimkan pesan secara berkala ke bagian administrasi perusahaan terkait dan menggalakkan seruan taat bayar pajak dari orang yang mempunyai pengaruh besar seperti tokoh politik dan tokoh masyarakat.
2. Pemerintah Kota Medan harus berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya, seperti pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*) berkala untuk pihak yang berhak. Pemerintah juga harus terus melakukan pengkajian dan merumuskan kebijakan perpajakan daerah yang efektif dan efisien, serta mempunyai rencana kerja strategis dalam rangka meningkatkan pelaksanaan yang efektif dan efisien seperti disusunnya *blue print* tata kelola pajak hiburan Kota Medan yang realistis dan berkesinambungan.
3. Seiring berkembangnya kemajuan Kota Medan, maka perkembangan tempat-tempat hiburan pun semakin pesat, diperlukan koordinasi dari semua pihak termasuk pemerintah daerah, lembaga dinas, perguruan tinggi, organisasi nirlaba, aktivis sosial dan masyarakat untuk terus menjaga kondusifitas di Kota Medan berupa keamanan dan kenyamanan, sehingga tercipta lingkungan yang sadar pengelolaan dan taat aturan serta sikap tanggungjawab dari masing-masing pribadi berdasarkan hak dan kewajibannya sesuai peran dan sumbangsihnya menjadi warga Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Wantara, *Analisis Pendapatan Asli Daerah dan Bantuan Pemerintah Pusat di DIY 1970 – 1992*, Kinerja – Jurnal Bisnis dan Ekonomi No.2; Yogyakarta: 1997.
- Ahmad Yani, *hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Budiono, *ekonomi Makro*, edisi ke 26, yogyakarta: BPFE, 2014.
- Duwi Priyatno, *teknik mudah dan cepat melakukan analisis data penelitian dengan SPSS dan tanya jawab ujian pendadaran*. Yogyakarta: Gaya Media, 2010.
- Fuad Rahmany, *Realisasi Pendapatan Pajak 2013 Capai Rp1.000 Triliun*, Jakarta; Artikel Bisnis dan Keuangan Kompas, 2014.
- Hariyanto dkk, *hubungan antara dana alokasi umum, belanja modal, pendapatan asli daerah dan pendapatan per kapita*, Makassar: simposium nasional, 2007.
- Henry Rotuahman, *Analisis Pengaruh Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Sumber Penghasilan Perusahaan dan Sumber Pendapatan Masyarakat Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di Kota Medan; Analisis Jalur*, repository.usu.ac.id/handle/123456789/38076; Medan: 2013.
- Indra Maipita, *Metode Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta: Digibooks, 2010.
- Landiyanto, Agustino, *kinerja keuangan dan strategi pembangunan kota di era otonomi daerah : studi kasus kota surabaya*, CURES working paper surabaya, 2005.
- Livitian, dkk, *Accelerating Inflation and Balance of Payment Crisis, 1973 – 1984 in The Israeli Economy*, Cambridge; Harvard University Press, 1986.

Mankiw, N. Gregory, *teori Makroekonomi*, Jakarta: edisi keempat, terjemahan, Erlangga, 2000.

M. Ridawan dkk, *ekonomi pengantar mikro makro Islam*, Bandung: Citapustaka Media, 2013.

Nursetyo, *Analisis Pengaruh Variabel Makroekonomi Regional terhadap Tingkat Kemiskinan Perkotaan; Studi Kasus 44 Kota di Indonesia 2007 – 2012*, Semarang; Universitas Diponegoro, 2013.

Penjelasan undang- undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.

Peraturan daerah kota medan, *nomor 7 tahun 2011 tentang pajak hiburan*.

Peter Montiel, *Empirical Analysis of High Inflation Episode in Argentina, Brazil and Israel*, dalam *IMF Working Paper*, Vol.36 No.3, September 1989.

Siahaan Marihot. *Pajak daerah dan Retribusi daerah*, Jakarta: Raja gravindo, 2010.

Silviana, safitri, *perencanaan sistem instalasi pengolahan air limbah*, Jakarta: UI Press, 2009.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung; Alfabeta, 2013.

Suparmoko. *Ekonomi Publik: untuk keuangan dan pembangunan daerah*, Yogyakarta: Andi, 2001.

Suseno dan Siti Astiyah, *Inflasi*, Jakarta; Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2009.

Toar Waraney Lakoy, “Kontribusi dan pengaruh penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan Asli daerah di Kabupaten Minahasa selatan 2005-2014”, *dalam jurnal berkala ilmiah efisiensi*, volume 16 No. 01 Tahun 2016.

Undang- undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, *tentang pajak daerah dan retribusi daerah*.